

**NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBALAJARAN FIKIH  
DI MTsN 1 DAN MTs MUSLIMAT NU  
PALANGKA RAYA**



Disusun Oleh :

**Dr. H. MAZRUR, M.PD**  
**NIP. 196206081989031003**

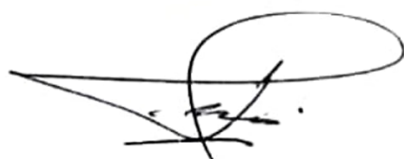
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN TARBIYAH  
TAHUN 2017 M/1439 H**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

1. Judul Penelitian : Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya
2. Nama Lengkap : Dr. Mazrur, M. Pd
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat/Gol/NIP : Pembina (IV/a)/19620608 1998031003
5. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
6. Bidang Ilmu yang Diteliti : Pendidikan
7. Lokasi Penelitian : MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya
8. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) Bulan
9. Sumber Dana Penelitian : DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2017
10. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Palangka Raya, 20 Nopember 2017

Mengetahui:  
Ketua LP2M,



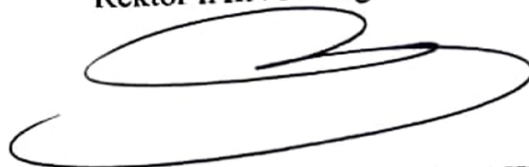
**Ajahari, M. Ag**  
NIP. 19710302 199803 1 004

Peneliti,



**Dr. Mazrur, M. Pd**  
NIP 196206081998031003

Disahkan oleh  
Rektor IAIN Palangka Raya,



**Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH., MH.**  
NIP 19750109 199903 1 002

## LEMBAR PERSETUJUAN PENANGGAP UTAMA

1. Judul Penelitian : Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya
2. Nama Lengkap : Dr. Mazrur, M. Pd
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pangkat/Gol/NIP : Pembina (IV/a)/ 196206081998031003
5. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
6. Bidang Ilmu yang Diteliti : Pendidikan
7. Lokasi Penelitian : MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya
8. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) Bulan
9. Sumber Dana Penelitian : DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2017
10. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
11. Telah diseminarkan pada : 26 Oktober 2017

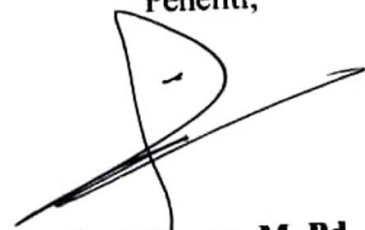
Palangka Raya, 20 Nopember 2017

Disetujui oleh  
Penanggung Utama,



**Dr. Ali Sibram, M. Ag**  
NIP. 19740423 20011 1 002

Peneliti,



**Dr. Mazrur, M. Pd**  
NIP 196206081998031003

## ABSTRAK

Menjadikan warganegara yang demokratis adalah salah satu fungsi pendidikan nasional. Untuk itu perlu pembudayaan nilai demokrasi, yang salah satu caranya adalah dengan menerapkan nilai demokrasi dalam aktivitas pembelajaran. Salah satu mata pelajaran agama yang banyak mengandung perbedaan pandangan adalah mata pelajaran fikih yang diajarkan di MTs. Siswa MTs sudah mulai bisa berfikir abstrak karena itu sering terjadi benturan pandangan dan pengalaman dari siswa. Hal ini mengharuskan guru menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih.

Beranjak dari hal tersebut maka perlu diadakan penelitian dengan rumusan masalah (1) Bagaimana nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di MTsN 1 Palangka Raya dan MTs Muslimat NU Palangka Raya, dan (2) Faktor apa yang mempengaruhi dalam penerapan nilai demokrasi pada mata pelajaran fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palangka Raya dan di Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU Palangka Raya dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Pembelajaran fikih di kelas VII MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya dilakukan dengan menggunakan model direct learning dan cooperative learning. Pada direct learning digunakan ceramah bervariasi sehingga memungkinkan interaksi yang lebih terbuka dengan guru maupun antar sesama siswa. Nilai demokrasi yang dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran tersebut adalah keebasan, kesetaraan, toleransi, keterbukaan, kepercayaan dan persaingan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai demokrasi adalah kesiapan siswa, kemampuan guru memahami perkembangan kognitif siswa, penciptaan suasana yang menyenangkan, kebebasan berinteraksi dan model pembelajaran yang digunakan.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH DI MTsN 1 DAN MTs MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA”**.

Penyelesaian penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH. MH, selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah menetapkan /menunjuk sebagai penerima bantuan penelitian individu.
2. Bapak Drs. Fahmi, M.Pd, selaku Dekan FTIK IAIN Palangka Raya yang telah merekomendasikan untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak H. M. Barit Rayanto, S.Sos., M.S., selaku Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang telah memberi izin untuk mengadakan penelitian di kota Palangka Raya
4. Bapak Ajahari, M.Ag, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang banyak membantu dalam koordinasi, mulai persiapan, pelaksanaan serta berakhirnya penelitian.
5. Ibu Rita Sukaesih, S.Pd,M.Si Kepala MTsN 1 Kota Palangka Raya dan Ibu Titin Kartika, A, S.Pd Kepala MTs Muslimat NU Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk meneliti di kedua madrasah tersebut;
6. Ibu Fitriyah, S. Ag dan Ibu Radiah, S. Ag. guru mata pelajaran Fikih di MTsN 1 Kota Palangka Raya dan Ibu Rina Rusmalina, S.Ag, M.Pd guru mata pelajaran Fikih di MTs Muslimat NU Palangka Raya yang telah bekerjasama dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat mengadakan penelitian di kelas-kelas yang mereka ajar.

Akhirnya, dengan rasa tulus dan ikhlas penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbangan pikiran dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian ini. Mudah-mudahan hasil penelitian dapat bermanfaat. Amin.

Palangka Raya, 20 Nopember 2017

Dr. H. MAZRUR, M.Pd

NIP. 196206081989031003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrohmanirrahim*

Dengan ini kami menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH DI MTsN 1 DAN MTs MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA”** adalah karya kami sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka kami siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Palangka Raya, 20 Nopember 2017

Yang membuat pernyataan

Dr. H. MAZRUR, M.Pd  
NIP. 196206081989031003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Demokrasi Pendidikan Islam .....	10
B. Paradigma Pendidikan Islam yang Demokratis .....	13
C. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan Islam .....	21
D. Karakteristik Pembelajaran yang Menerapkan Nilai Demokrasi.....	24
E. Teori-teori Belajar yang Mendukung Pembeajaran yang Demokratis..	25
F. Model-model Pembelajaran yang dapat Menerapkan Nilai Demokrasi	27
G. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Penerapan Nilai Demokrasi	28



H. Penelitian Terdahulu .....	29
-------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
C. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Visi, Misi serta Keadaan Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di MTsN 1 Palangka Raya .....	36
B. Visi, Misi serta Keadaan Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di MTsN Muslimat NU Palangka Raya .....	41
C. Pembelajaran Fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya.....	44
D. Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya.....	55
E. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Fikih.....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Hlm</b>
Tabel 1	Rekap Jumlah Siswa MTsN Kota Palangka Raya tahun ajaran 2017/2018 37
Tabel 2	Tugas Guru MTsN Kota Palangka Raya tahun ajaran 2017/2018 38
Tabel 3	Tugas Tenaga Kependidikan MTsN Kota Palangka Raya tahun ajaran 2017/2018 40
Tabel 4	Rekap Jumlah Siswa MTs uslimat NU Palangka Raya tahun ajaran 2016/2017 42
Tabel 5	Guru dan Tenaga TU MTs Muslimat NU Palangka Raya tahun ajaran 2016/2017 43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SURAT KEPUTUSAN PENELITIAN
2. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
3. SURAT IJIN PENELITIAN
4. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
5. DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL
6. DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL
7. FORM PENANGGAP UTAMA
8. RAB & REALISASI
9. DOKUMENTASI PENELITIAN
10. SURAT TUGAS PENELITIAN (NOTA)
11. BIODATA PENELITI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak pertengahan tahun 2016 sering dibicarakan tentang kebhinnekaan, toleransi dan demokrasi. Padahal kebhinnekaan, toleransi dan demokrasi sudah sejak awal kemerdekaan menjadi dasar dan tonggak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun sampai sekarang masih dirasakan lemahnya sikap demokratis dan toleransi. Berbagai kejadian sering dipertunjukkan oleh anak bangsa ini, yang menunjukkan sikap tidak toleran dan demokratis, seperti menganggap musuh terhadap orang yang berbeda pandangan atau faham, bertindak anarkis terhadap pandangan yang berbeda dan lain sebagainya.

Keinginan untuk menjadi masyarakat yang demokratis dan menghargai perbedaan sudah ditanamkan sejak awal kemerdekaan dan telah melalui masa yang sangat dramatis setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 maret 1998 sebagai tanda mengakhiri pemerintahan orde baru yang banyak dikatakan oleh para ahli pemerintahan sebagai masa yang berada dibawah pemerintahan yang refresif. Sejak itulah terjadinya Transisi Indonesia menuju demokrasi yang sebenarnya dan memasuki era reformasi. Transisi Indonesia menuju demokrasi menimbulkan kegamangan dan kecemasan, karena semakin lama semakin banyak kecenderungan penyelesaian komplek melalui cara-cara yang tidak demokratis. Seperti penggunaan kekerasan, pemaksaan kehendak, money politik dan cara-cara *undemocratic* lainnya, bahkan seringkali terjadinya konflik domestik dengan berbagai macam bentuknya. Perkembangan ini jelas merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Menurut Sorensen, (1993) dalam Tim ICCE UIN Jakarta disebutkan bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan dan pada gilirannya diikuti

dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis.<sup>1</sup>

Penggunaan cara-cara yang tidak demokratis dan kekerasan tidak hanya terjadi pada elite politik tapi juga berimbas pada akar rumput. Perbedaan pandangan sering kali tidak diselesaikan dalam bentuk dialog tapi diselesaikan dengan cara-cara yang anarkis. Gejala ini tentu menjadi pertanyaan apakah pendidikan demokrasi yang selama ini didengungkan belum berhasil membuat bangsa Indonesia lebih demokratis, toleran dan menghargai keragaman, padahal di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan bahwa : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Azra, transisi menuju demokrasi mencakup reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan, *Pertama*, reformasi sistem (*constitutional reform*), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. *Kedua*, Reformasi Kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reform and empowerment*) lembaga-lembaga politik. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Berkaitan dengan bagian ketiga, yaitu pengembangan kultur demokratis harus dilakukan melalui semua segmen masyarakat, mulai dari elit politik sampai rakyat awam, terutama melalui proses pendidikan. Upaya dan strategi untuk mengatasi hal itu dapat dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan demokrasi. Salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan sikap demokratis adalah di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertaqwa,

---

<sup>1</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003. Hal. x

berilmu, bermoral dan memiliki sikap demokratis. Berbagai pandangan menyebutkan bahwa cara yang paling strategis harus dilakukan dengan “mengalami” dan “memberdayakan” demokrasi yaitu melalui pendidikan demokrasi (*democracy education*) dan pembelajaran yang demokrasi.

Pendidikan demokrasi tidak hanya penting bagi negara-negara yang berada dalam transisi seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara yang telah mapan demokrasinya, karena pendidikan demokrasi tidak hanya sekedar pemahaman terhadap makna demokrasi tetapi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai dan praktek demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui mata pelajaran yang langsung membahas pokok bahasan tentang demokrasi, akan tetapi yang lebih penting adalah membiasakan anak didik untuk bersifat demokratis. Dalam kegiatan pembelajaran seharusnya menerapkan nilai demokrasi karena dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan pada pasal 4 ayat 1 adalah : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Mengamati UUSPN pasal 4 ayat 1 tersebut jelaslah bahwa prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah prinsip demokrasi, karena itu para pendidik berkewajiban untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan nilai demokrasi.

Penanaman nilai-nilai demokrasi seyogyanya harus dilakukan pada semua mata pelajaran yang memungkinkan untuk menerapkan strategi pembelajaran yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang demokrasi. Salah satunya dapat dilakukan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terutama pada mata pelajaran fikih, karena di dalam Pendidikan Agama Islam banyak sekali materi-materi yang perlu didekati dengan pendekatan dan strategi pembelajaran yang demokratis.

Demokrasi pendidikan Islam secara epistemologis harus dilakukan dengan basis kebenaran relatif (kebalikan dari mutlak) dan paradigma pemikiran yang ilmiah. Basis kebenaran relatif dan paradigma pemikiran yang ilmiah ini, artinya benar untuk masa tertentu atau tempat tertentu namun belum tentu ditempat dan waktu yang lain.<sup>2</sup>

Menurut Dimiyati, model pelaksanaan pendidikan agama sekarang ini baru menekankan proses transisi pengetahuan agama dengan arah tujuan pada tingkat kognitif rendah yang tidak akan mampu membangun pemahaman beragama serta kepribadian muslim yang utuh.<sup>3</sup> Padahal dalam materi pembelajaran fikih banyak sekali terjadi pandangan dan penerapan yang berbeda, seyogyanya para guru dapat mengakomodir berbagai perbedaan tersebut, namun seringkali pembelajaran fikih cenderung disampaikan menggunakan pendekatan ekspositori, pendekatan ini sering juga disebut dengan pendekatan tradisional atau konvensional.

Menurut Syarifuddin, materi pembelajaran fikih disampaikan hanya menurut salah satu pendapat yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para gurunya, padahal siswa memiliki latar belakang pengetahuan dan pengamalan yang berbeda.<sup>4</sup> Diantara perbedaan tersebut adalah berbedanya latar belakang pendidikan, pengetahuan, lingkungan tempat bergaul anak, sosial ekonomi, serta sosial kultural dan lain sebagainya.

Perbedaan latar belakang anak tersebut mengharuskan guru untuk memahaminya dan melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir pandangan yang berbeda, karena mata pelajaran fikih banyak sekali materi yang harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara penerapan antara satu dengan yang lainnya sering terjadi perbedaan dalam hal-hal yang bersifat teknis.

---

<sup>2</sup> Syamsul Arifin dan Ahmad barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf Dalam Islam*, Malang : UMM Press, 2001. Hal. 133

<sup>3</sup> Muhammad Dimiyati, "Difusi Unsur Kebudayaan dan Problematika Pembelajaran Agama di Indonesia dalam Era Teknologi Informasi, *Makalah*, dipresentasikan pada Seminar HAB Depag RI ke 50 di Surabaya tanggal 30 Desember 1993 hal. 3

<sup>4</sup> Syarifuddin, A. *Interilasi Fikih dengan Ilmu lain dalam Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986. hal. 6

Menurut Philips, rumusan-rumusan fikih untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam disatu sisi dengan tuntutan kondisional masyarakat muslim disisi lain. Itulah sebabnya dalam konteks seperti itu, fikih bisa disebut pula sebagai produk upaya “pribumisasi” Islam yang diperoleh melalui proses interpretasi atas ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun sunah Nabi. Hal ini diperlukan terutama untuk memelihara kesahihan beribadah sesuai dengan keyakinan dan keterbatasan pengetahuan.<sup>5</sup>

Dengan mengetahui perbedaan tersebut dapat menjadikan siswa lebih siap dalam memahami dan menghadapi perbedaan, sehingga hal-hal negatif seperti konflik atau permusuhan dapat dihindari, sekaligus menjadikan siswa lebih dewasa serta memiliki sikap toleran dalam menghadapi perbedaan. Penamaan sikap seperti ini diharapkan punya dampak tidak hanya pada pembelajaran ini, tapi juga dalam sikap kesehariannya.<sup>6</sup>

Pembelajaran yang demokratis tentunya menghindari cara-cara yang indoktrinasi serta serba hapalan, melalui model pembelajaran demokratis di kelas, diharapkan akan memberikan pengalaman berdemokrasi yang berharga baik bagi peserta didik dan pendidik. Dengan mengalami demokrasi secara langsung melalui pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual diharapkan persemaian kultur demokrasi (*democratic culture*) menjadi langkah awal yang strategis bagi pengembangan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan berkeadaban (*smart, active, critical, and civilitized citizen*).<sup>7</sup> Model pembelajaran ini menerapkan nilai-nilai demokrasi serta dilakukan secara interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis.

Oleh karena itu, maka penerapan nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk dilakukan pada pembelajaran fikih, karena tidak hanya meningkatkan hasil

---

<sup>5</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Evaluasi Fikih*, terj. Ginus Partadiredja Bandung: Anjana Pustaka, 2007. Hal. xi.

<sup>6</sup> Pengungkapan tentang keragaman pelaksanaan tradisi peribadatan ini lebih lengkap dikemukakan dalam buku Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012. Hal. 60. Di dalam buku tersebut tidak menjastifikasi terhadap tradisi masyarakat melaksanakan peribadatan, tapi memaparkan apa adanya yang terjadi di masyarakat.

<sup>7</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003. Hal. 5.



belajar fikih tapi juga dapat menanamkan sikap demokrasi bagi anak didik. Penanaman nilai-nilai demokrasi tidak didapatkan dengan serta merta tapi melalui proses yang panjang, karena menurut Robert W. Heffner untuk menuju tatanan demokrasi keadaban yang lebih *genuine* dan autentik bukanlah hal yang mudah dan instan; sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran, dan pengamalan (*learning by doing*), serta pendalaman (*deepening*) demokrasi.<sup>8</sup> Proses panjang ini tidak lain dilakukan dalam rangka mengembangkan kultur demokrasi. Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis berkeadaban melalui pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai yang demokratis.

Pada mata pelajaran fikih kegiatan pembelajaran harus diciptakan suasana yang demokratis atau dengan kata lain menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mendidik anak untuk bersikap demokratis, tapi juga karena materi pelajaran fikih banyak terdapat perbedaan sehingga memerlukan sikap saling memahami, menghargai dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, karena itu diperlukan guru yang dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi. Namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya<sup>9</sup> selama ini kegiatan pembelajaran fikih masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional yaitu dengan pendekatan ekspositori. Menurut Mulyadi, metode mengajar guru selama ini lebih banyak menggunakan ceramah, yang hanya mentransfer pengetahuan (*transfer of knowlage*) kepada siswa. Hal ini mengakibatkan situasi belajar membosankan, siswa pasif, dan kurang mendukung untuk pembentukan sikap demokratis. Strategi pembelajaran guru tersebut harus direformasi dengan strategi pembelajaran yang mengakibatkan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.<sup>10</sup> Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi guru harus secara teratur menggunakan berbagai strategi pembelajaran interaktif seperti diskusi masalah-masalah aktual, sosial, dan membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang.

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 14

<sup>9</sup> Mazrur, Model Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangka Raya, *Penelitian* (tidak dipublikasikan), Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2012, hal 83 – 86.

<sup>10</sup> Mulyadi, Demokrasi dalam proses pembelajaran, [mulyaihza.blogspot.com/2010/05/demokratisasi-dalam-proses-pembelajaran.htm](http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/demokratisasi-dalam-proses-pembelajaran.htm), 1 Mei 2010. Dikutip tanggal 30 Maret 2017

Inilah yang memunculkan pertanyaan seberapa banyak guru sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih dan bagaimana cara guru menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran, apakah memiliki dampak terhadap perilaku anak didik, faktor apa yang mempengaruhi cara guru dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran dan berbagai pertanyaan lainnya yang layak untuk dikemukakan. Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka sudah saatnya dilakukan kegiatan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Sardiman, sebagai perwujudan kongkrit dari pendidikan yang demokratis adalah sikap guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak menang sendiri dan tidak merasa paling tahu.<sup>11</sup> Sikap guru dalam kegiatan pembelajaran bukan hanya sebagai sebuah model, strategi atau metode untuk menyampaikan isi pelajaran, akan tetapi semua sikap, perilaku dan segala yang dilakukan akan menjadi pelajaran dan membekas dalam jiwa anak didik. Jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan nilai demokrasi, maka diharapkan nilai demokrasi itu akan melekat dalam diri anak didik. Apa yang ada dalam benak tersebut selalu diingat dan dapat mereka jadikan sebagai pegangan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian apakah guru sudah menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih, bagaimana guru menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih yang dilihat dari metodologinya maupun karakteristik materinya, karena materi pembelajaran fikih memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat, pandangan dan aliran, atau mungkin juga ada faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penanaman nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih.

---

<sup>11</sup> Sardiman, A.S., Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Aspek Kebijakan, Makalah disajikan dalam *Seminar dan Diskusi Panel Nasional Teknologi Pembelajaran V Kerjasama UM dan IPTPI Cabang Malang di Malang*, 20 Nopember 2000. Hal. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih dapat dilakukan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Mata pelajaran fikih hanya ada di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Sedang pada SD, SMP dan SMA/SMK bahasan fikih terdapat dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Tsanawiyah, karena di Madrasah Tsanawiyah diberikan pelajaran mata pelajaran fikih dan dilihat dari usia anak didiknya sudah memasuki usia yang dapat berdialog atau memasuki masa operasional formal.

Sehubungan dengan ini, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di MTsN 1 Palangka Raya dan MTs Muslimat NU Palangka Raya.
2. Faktor apa yang mempengaruhi dalam penerapan nilai demokrasi pada mata pelajaran fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

- a. Mendeskripsikan tentang cara guru dalam menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Palangka Raya.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Palangka Raya

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Guru, untuk dapat menjadikan pelajaran tentang cara menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih yang selanjutnya dapat menjadi bahan kajian untuk menganalisis, melengkapi dan

menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran fikih atau mata pelajaran lainnya.

- b. Kepala Madrasah, untuk mengetahui model pembelajaran yang dapat penerapan nilai demokrasi. Di samping itu juga dapat menjadi bahan analisis bagi kepala sekolah/madrasah untuk mengadakan pengkajian dan atau pelatihan bagi guru dalam penguasaan model dan strategi pembelajaran dan dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi.
- c. Kepala Kementerian Agama Kota Palangka Raya, untuk menjadi dasar pijakan dalam melakukan kegiatan pembinaan guru, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya.
- d. Peneliti, diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengadakan penelitian yang akan datang, baik yang menyangkut pengembangan model dan strategi pembelajaran, penelitian kebijakan tentang penempatan, pelatihan dan pengembangan guru, maupun penelitian-penelitian lainnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Konsep Demokrasi Pendidikan Islam

Demokrasi berasal dari kata Yunani Kuno, yaitu *demokratia*<sup>12</sup>. Kata ini merupakan kombinasi dua kata yaitu *demos* yang berarti masyarakat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan atau undang-undang yang berakar pada rakyat. Dengan perkataan lain, dalam term politik bahwa kedaulatan tertinggi terletak ditangan rakyat semua. Pengertian demokrasi inilah yang secara etimologi lebih dapat diterima.<sup>13</sup>

Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak (*freedom of speak and press*). Artinya didalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada didalam masyarakat. Dengan perkataan lain. Pluralisme dan relativisme kebenaran pada akhirnya muncul untuk menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan yang kini tampak lebih menjadi aus dan usang oleh petasan transformatif sosial budaya dan perubahan masyarakat modern.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, demokrasi dilihat dari segi sifatnya ada yang bersifat pokok dan ada yang sifatnya *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok itu. Nilai pokok demokrasi, menurutnya adalah kebebasan, persamaan dan musyawarah atau permusyawaratan. Beliau juga mengutip pendapatnya Syeikh Ali Abdurrazziq yang menyatakan bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syura.<sup>14</sup> Demokrasi dapat dibedakan kepada formal-prosedural yang berupa syura. Artinya syura atau permusyawaratan sering dianggap demokrasi. Hal ini benar, kalau dilihat dari bentuk (form). Dengan kata lain, bentuk demokrasi dapat berubah syura dan lainnya. Dan

---

<sup>12</sup> Zakaria Abdul Mun'im Ibrahim al-Khatib, *Nidham al-Syura fi al-Islam wa Nadham al-Demoqrathiyah al-Mu'ashirah*, 1405 H/1985 M. Hal 244.

<sup>13</sup> al-'Amid Sulaiman Muhammad al-Thamawy, *al-Demoqrathiyah wa al-Dustur al-Jadid*, Hai'ah al-Isti'lamat al-Mishriyah, Mesir 1971 M. Hal. 7

<sup>14</sup> Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Masyhur Amin & Mohammad Najib... op. Cit. Hal. 89

demikian pula demokrasi dapat kita rujuk kepada material-substansial yang berupa nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan.

Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial.

Secara etimologi, kata *syura* atau musyawarah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau mengemukakan pendapat yang ada pandanya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologis)-nya, para pemerhati kata itu berbeda-beda pendapat. Imam Al-Ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah “mengeluarkan pendapat atau pemikiran untuk meneliti atau memeriksa (*muraja'ah*) dan membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya.<sup>16</sup> Dan menurut Ibn Araby, musyawarah adalah mengumpulkan berbagai alasan agar masing-masing individu menunjukkan (Arab: *Yastasiru*) dan mengemukakan pendapatnya.<sup>17</sup>

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi membuat suatu kesimpulan bahwa musyawarah (*syura*) adalah berfikir tentang sesuatu masalah tertentu dengan orang untuk memperoleh dan menetapkan kemaslahatan yang dimaksud (dikehendaki) secara *syari'ah*.<sup>18</sup>

*Syura*, sebagai bentuk (form) pelaksanaan demokrasi yang bermacam-macam itu membawa nilai lain, yaitu keterbukaan. Karena itu, dalam pemikiran pendidikan yang demokratis, keterbukaan adalah mutlak diperlukan : keterbukaan yang mengandung perbedaan-perbedaan pendapat (ikhtilaf). Sebab dalam musyawarah, demikian persepsinya Anwar Haryono, bahwa lawan pendapat adalah kawan berpikir.<sup>19</sup> Disana tidak boleh ada monopoli kebenaran dan apalagi semboyan-semboyan : “siapa tidak setuju saya, adalah musuh saya”.

---

<sup>15</sup> *Mu'jam al-fadh al-Qur'an al-Karim, juz II, I'dad Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*, Kairo-Mesir 1970 M. Hal. 40

<sup>16</sup> Abu Tsana' al-Alausy, *Ruh al-Ma'ani di tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Ma'ani*, al-Minbariyah, Mesir 1345 H, juz XXV. Hal. 42

<sup>17</sup> Abu Bakar Ibn al-Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I, Dar-al-Ihya'al-Kutub al-Arabiyyah, 1957 M. Hal. 297

<sup>18</sup> Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Restrukturisasi dan aktualisasi tradisi ikhtilaf dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hal. 118

<sup>19</sup> Anwar Hariyono, *Lawan Pendapat adalah Kawan Berpikir*, Majalah Bulanan Media Dakwah, No 197, Rabi'ul Akhir 1411 H/November 1990 M. Hal. 6

Dalam perspektif pendidikan Islam, syura atau musyawarah yang menyemburkan nilai keterbukaan dalam demokrasi pendidikan adalah minimal untuk mendekatkan jarak akan terjadinya *konflik* yang sebagian besar diakibatkan oleh karena tertutupnya pendekatan dialogis yang sehat, alias jalan buntu atau diistilahkan dengan *road block*.

Menurut Ir. HM. Wierdan, jalan buntu atau *road block* sendiri terbagi dalam empat tipe<sup>20</sup> yaitu :

*Pertama, habitual road block.* Pemikiran pembaharuan, sistem yang dikenal dengan tajdid, biasanya terbentur oleh road block jenis ini. Denga alasan : jangan menyimpang dari kebiasaan (*habitat*) yang telah berakar lama; jangan aneh-aneh dan jangan sok-sokan berusaha mencari pembaharuan sistem, tidak ada gunanya.

*Kedua, cultural road block.* Disini adalah penyelesaian budaya (*cultur*) sangat menentukan lancar atau buntunya suatu program untuk dilaksanakan. Sebuah metode yang ingin diaktualkan dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah atau bahkan diperguruan tinggi sekalipun kiranya memerlukan kontak keseimbangan dengan budaya atau kultur dan kemampuan peserta didik. Meskipun kadang suatu konflik antara guru-siswa atau dosen-mahasiswa merupakan kejadian wajar yang biasa terjadi didalam kelas. Karena adanya berbagai kepentingan yang memotivasi (*conflict needs situation*) antara kedua belah pihak yang sulit dimodifikasi atau diubah.

*Ketiga, etimologi road block.* Masalah ini sangat pribadi, karena menyangkut masalah karakter, pribadi manusiannya dan hal-hal yang subyektif seperti selera, pantangan dan sebagainya.

*Keempat, perceptual road block.* Inti dari road block ini adalah perbedaan tata nilai. Suatu program yang oleh seseorang dianggap sudah tepat belum tentu dinilai baik oleh orang lain, karena belum mempunyai persepsi yang sama terhadap program tersebut.

Oleh karena itu, maka keterbukaan dalam bentuk wahana *syura* yang bersifat dialogis kiranya menjanjikan keselarasan dan keseimbangan diantara kepentingan atau penemuan yang berbeda. Sehingga demokratisasi pendidikan, akan berarti relevansinya

---

<sup>20</sup> HM. Wierdan, *Sebab-sebab Konflik : sebuah tinjauan manajerial*, Majalah Suara Muhammadiyah No. 16, Th. Ke-77, 16-31 Agustus 1992. Hal. 38039

dengan kemampuan profesional manusia peserta didik. Artinya, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan (baca : peserta didik).

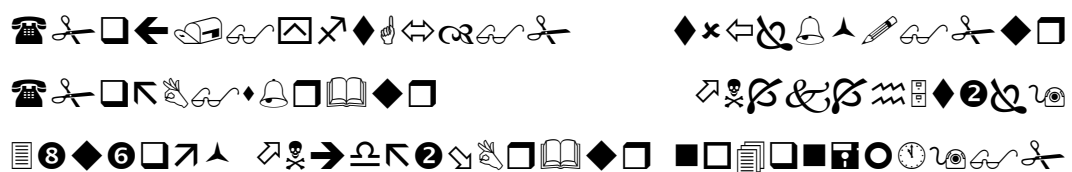
Dengan demikian, jelaslah bahwa syura yang mencerminkan diri sebagai sebuah wahana keterbukaan merupakan salah satu prinsip demokrasi pendidikan Islam. Bahkan dalam prespektif demokrasi pendidikan Islam ini, syura adalah sebagai *common denominator* (titik pertemuan) bagi berbagai kepentingan yang berbeda.

## B. Paradigma Pendidikan Islam Yang Demokratis

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagaman sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan lebih singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan, dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama, dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu (mengajar) kepada individu yang memerlukan pendidikan itu (pembelajar).

Pendidikan demokratis merupakan paradigma pendidikan yang harus dikembangkan di era global ini. Pendidikan demokratis merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu, pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing didalam perwujudan diri sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta.

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang demokratis. Hal ini dapat dipahami dari kandungan firman Allah dalam surah Asy-syuura (42) : 38 .







38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang demokratis juga dapat ditemukan dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Didalam ini dikenal apa yang disebut dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan ini diatur pada bab III, pasal 4 yang secara lengkap berbunyi berikut :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan daya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.<sup>21</sup>

Agar kultur sekolah yang demokratis ini dapat terwujud maka proses pendidikan yang masih didominasi dengan kegiatan ceramah (menyampaikan informasi), mendengarkan, bukan interpretasi dan pemaknaan, serta berpusat pada guru (*teacher centris*) harus diubah dengan pola pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pribadi

---

<sup>21</sup> Depdiknas, UU RI No 20 Tahun 2003

yang unik. Yaitu, dengan memberi peluang yang luas kepada siswa untuk berkreasi, membangun imajinasi, serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam kaitan ini, Freire menyarankan untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya dalam PBM di kelas.<sup>22</sup> Sebab itu, PBM harus terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan *equiti* (kesetaraan). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif berbeda aspirasi dan pendapat, dan keadilan dalam pendidikan maka terakomodasi dengan baik. Bahkan, Wahid seperti yang dikutip Freire telah meyakinkan kita bahwa pendidikan memang merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan (kebebasan).<sup>23</sup> Dengan kebebasan ini, menurut Russel, akan mewujudkan demokratisasi pendidikan.<sup>24</sup>

Sedangkan, tujuan dari membangun sekolah yang demokratis adalah terciptanya peserta didik yang memiliki kualitas demokrasi yang dapat dilihat dari ciri kualitatif dan indikator perilakunya. Sikap-sikap itu antara lain sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Mengutamakan kepentingan negara atau umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum.
3. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda.
4. Terbuka menerima pendapat orang lain.
5. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik, benar, dan bertanggung jawab.
6. Bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima atau menolak pandangan orang lain.
7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.
8. Menghormati hak orang lain.
9. Menghormati kekuasaan yang sah.

---

<sup>22</sup> Freire, P. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1984. Hal. 24

<sup>23</sup> Ibid, Hal. xv

<sup>24</sup> Russel, B., *Pendidikan dan Tatanan Sosial*, terj. Abadi, A.S., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Hal. 63

10. Bersikap adil dan tidak diskriminatif.
11. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab.
12. Berusaha selalu berkomunikasi individual.
13. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua osis, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan.
14. Berani mengajukan petisi (saran atau usul).
15. Berani menulis artikel, pendapat, dan opini di majalah dinding.
16. Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan Osis.
17. Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program osis dan sebagainya.

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen.<sup>25</sup> Menurut Hujair Sanaky, demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani. Artinya, pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia, lebih humanis, beradap, dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani.<sup>26</sup>

Melalui demokratisasi pendidikan, diharapkan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidikan dan peserta didik didalam proses belajar mengajar. Sementara Moh. Shofan dalam *realistik education*, mengatakan demokrasi pendidikan bukan hanya prosedur, melainkan juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dirinya.<sup>27</sup> Sedangkan, Mastuhu menyatakan bahwa demokratisasi pendidikan adalah gagasan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia menurut kondisi subjektif atau kemampuannya untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraihinya.<sup>28</sup>

Demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, turut bertanggung

---

<sup>25</sup> Ainun Naqim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multi Kultural : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008. Hal. 61

<sup>26</sup> Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003. Hal. 245

<sup>27</sup> Moh. Shofan, *ed.Realistik Education ; Menuju Masyarakat Utama*, Yogyakarta: Ircisod, 2007. Hal. 123

<sup>28</sup> Mastuhu, "Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi panel senat mahasiswa *Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel*, Malang, 26 Oktober 1996.

jawab (*meluangrungskabi*), terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki (*meluhandarbeni*), sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya (*padhasarasa*), dan mempelajari kehidupan masyarakat. Pendeknya, demokratisasi pendidikan bertujuan untuk menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, berpikir kritis, serta toleran dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi.

Pendidikan yang demokratis pada esensinya adalah pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pola pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*) kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing didalam perwujudan diri sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada sang penciptanya.<sup>29</sup> John S Brubacher, dalam *modern filosofies of education* (1978), menjelaskan bahwa pendidikan demokratis merupakan pendidikan yang menghargai kemuliaan manusia (*dignity*); keberbagian (*sharing*), ketika yang berbeda-beda itu (*differences*) harus diberi tempat, semua yang berbeda harus berbagi untuk prinsip-prinsip umum.

Dalam pendidikan yang demokratis, perlu dikembangkan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik sehingga akan terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja berbeda dengan pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkannya.<sup>30</sup> Selain itu, dalam pendidikan ini kemerdekaan dan kebebasan setiap peserta didik untuk beraktualisasi dan ber ekspresi harus dijunjung tinggi. Sebaliknya, penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan harus dijauhan. Sebab, penindasan dalam segala bentuknya tidak sesuai dengan esensi pendidikan sebagai pembebas dan pemanusiaan manusia secara hakiki. Hal ini sejalan dengan indikator dari demokrasi yang harus terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan (paksaan), dan menaati aturan yang telah ditetapkan bersama.

Disamping itu, pendidikan yang demokratis juga harus dapat mengembangkan toleransi dan *sosial trust* dikalangan anak didik. Hal tersebut diwujudkan dengan

---

<sup>29</sup> Diding Nurdin, "Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani", *Harian Pikiran Rakyat*, 23 Nopember 2008.

<sup>30</sup> Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam*,...Hal. 245

memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap anak didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan individu-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dengan lainnya.

Pendidik yang bervisi demokratis bahkan mengedepankan pendekatan pembelajarannya pada kapasitas kritis, keingintahuan, dan otonomi siswa. Dalam hal ini jelas, peranan seorang pendidik menggambarkan adanya kesan bahwa pembelajaran adalah tidak hanya menyampaikan isi (konten), tetapi juga “berpikir yang benar”. Proses belajar mengajar, bersama dengan penyelidikan atau penelitian adalah hal penting yang tidak terpisahkan dari lingkaran pengetahuan kespiritualan pada keingintahuan.

Dalam konteks pembelajaran, pendidikan yang demokratis menuntut adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan *equity* (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif, berbeda aspirasi dan pendapat serta keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi dengan baik.<sup>31</sup>

Pola pengajaran yang demokratis harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah, yaitu dari peserta didik kepeserta (*top down*), melainkan juga ada keseimbangannya, yaitu dari peserta didik dengan pendidik (*bottom up*) dan antar peserta didik dengan peserta didik (*network*). Dengan demikian, tidak ada lagi pemaksaan kehendak pendidik kepada peserta didik, tetapi yang akan terjadi tawar-menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajarnya. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik ini maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja berbeda pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam iklim PBM yang demokratis, pendidik tidak harus merasa paling pandai dan merasa paling benar di kelasnya, serta merasa telah menang belajar satu malam dibandingkan dengan peserta didiknya. Akan tetapi akan terjadi tukar informasi dan pengalaman dengan peserta didiknya. Sebab, sumber belajar bukan hanya terletak pada

---

<sup>31</sup> Sudarman Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003. Hal. 15

pendidik, melainkan juga berada pada peserta didik. Disini, peserta didik betul-betul ditempatkan sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar atau sebagai gelas kosong yang diisi dengan berbagai ilmu oleh guru.

Melalui penerapan pola pembelajaran yang demokratis diharapkan mampu memberikan proses belajar mengajar yang lebih menyenangkan dan membesarkan hati (*mbombong*) peserta didik, bukan menekan atau merendahkan kemampuan peserta didik. Ini artinya, seorang pendidik haruslah mengedepankan pendekatan pembelajarannya pada kapasitas kritis, keingintahuan, dan otonomi siswa dengan menerapkan desain pembelajaran yang variatif dan inovatif. Dengan demikian, akan tercipta proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan (*fun*).

Sampai disini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam yang demokratis adalah sebuah pola pendidikan dan pembelajaran yang setidak-tidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pendidikan yang semaksimal mendekati diri kepada sang pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya.
2. Pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subjek pendidikan yang paling berintegrasi, saling mengisi, dan saling melengkapi satu dengan lainnya.
3. Pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas.
4. Pendidikan yang tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah kongret estafet dan pengalaman ilmu.<sup>32</sup>
5. Pendidikan yang menghargai adanya perbedaan (*the right to be different*) antar peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik.
6. Pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya kebebasan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersaing didalam perwujudan diri sendiri (*self*

---

<sup>32</sup> Syamsul Arifin dan Ahmad barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf Dalam Islam*, Malang : UMM Press, 2001. Hal. 138

*realization*); adanya perbedaan dan keanekaragaman, dan persamaan hak (*equalitarianism*).

7. Pendidikan yang didalamnya berkembang komunikasi struktural dan kultural antar pendidik dengan peserta didik sehingga terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab.<sup>33</sup>
8. Pendidikan yang memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap peserta didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan.
9. Pendidikan yang didalamnya terdapat kondisi yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, dan adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas.
10. Pendidikan yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong seoptimal mungkin berkembangnya potensi diri peserta didik.
11. Pendidikan yang menghargai kemuliaan manusia (*dignity*); individualitas dan kebebasan (akademis).
12. Pendidikan yang menempatkan pendidik dan anak didik secara proporsional.
13. Pendidikan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri siswa empati, toleransi, dan respek pada yang lain (*sosial trust*) dikalangan anak didik.
14. Pendidikan yang memahami kebutuhan manusia untuk selalu bersikap maju, bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
15. Pendidikan yang lebih mengutamakan proses dari pada hasil.

### **C. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan Islam**

Syamsul Arifin dan Ahmad Barazi dalam buku Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi mengemukakan bahwa prinsip demokrasi pendidikan Islam ada empat, yaitu :

---

<sup>33</sup> Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam*,...Hal. 245

## 1. Tauhid : Sebuah Paradigma Kebebasan

Tauhid, sebagai salah satu kunci pokok ke Islam an, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada penghambaan kecuali kepada Yang Maha Esa (Allah SWT), bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian. Dengan kata lain, seseorang telah mengikrarkan diri dengan *dua kalimah syahadat* berarti telah melepaskan diri dari belenggu dan subordinasi apapun.

Konsep tauhid ajaran Islam di atas merupakan paradigma sebuah pembebasan dan kebebasan manusia baik secara lahiriyah maupun rohaniah, kecuali kepada Tuhan. Ini mengisyaratkan sebuah ajaran bahwa dalam praktek pendidikan Islam tidak mengenal diskriminasi apa pun dan kelompok manusia tertentu<sup>34</sup>Disini tidak boleh terjadi pengkultusan kebenaran antara superioritas (guru) dengan imperioritas (siswa). Karena itu demokratisasi pendidikan pun harus diselaraskan dengan kemampuan profesional manusia peserta didik.

## 2. Syura : sebuah wacana Keterbukaan.

Ajaran syura atau musyawarah ini telah ditunjukkan oleh Allah sebelum diciptakannya manusia di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al Baqarah ayat 30 :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

---

<sup>34</sup> M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia, dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hal . 29



Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam urusan apapun sebelum dikembangkan atau diterjemahkan ke dalam aktivitas kerja praktis, lebih-lebih bagi seorang pemimpin (*ulil Amri*)

### 3. Konsep tentang Kewajiban dan Hak Manusia dalam Pengembangan Ilmu

Dalam surat Az Dzariyat ayat 56 disebutkan bahwa tugas pokok manusia di muka bumi sebagai *abdi* dan juga sebagai *khalifatun fil Ard* (wakil Tuhan di muka bumi) yang bertugass memakmurkan bumi deengan segala yang dimilikinya. Disini terlihat dua fungsi pokok antaa hak dan kewajiban.

### 4. Prinsip Sikap Ilmiah

Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang datang dari wahyu (Tuhan), dikenal dengan kebenaran mutlak. Namun demikian, masalah kebenaran, bukan saja persoalan agama (wahyu) akan tetapi juga merupakan persoalan ilmu pengetahuan yang menjadi motor penggerak setiap kegiatan keilmuan. Walaupun demikian secara normatif perdebatan mengenai kedudukan keduanya selalu dimenangkan agama (wahyu). Tetapi kenyataan dilapangan kadang meminta sebaliknya. Banyak hal mengenai kehidupan manusia yang diatur dan dikembangkan berdasarkan penemuan ilmiah tanpa bersinggungan dengan agama.<sup>35</sup>

Selain beberapa prinsip diatas, dalam demokrasi juga terdapat empat fungsi yang terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain, fungsi-fungsi tersebut sebenarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi.

#### 1. Demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*)

Demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*) artinya dengan demokrasi orang akan bebas melakukan apa saja. Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, berhak mengekspresikan apa yang ia kehendaki lewat perbuatan atau perilaku karena manusia secara alamiah ingin hidup bebas. Kebebasan sebagai salah satu prinsip demokrasi harus disertai pula dengan nilai etis dan normatif sehingga tidak berbenturan dengan norma yang berkembang dimasyarakat.

#### 2. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain (*as respect for dignity of person*)

---

<sup>35</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, Yogyakarta : SIPRESS, 1993. Hal. 10

Artinya, dengan demokrasi, seseorang akan memperlakukan orang lain sebagai mana dirinya atau memperlakukan orang lain sebagai manusia yang mempunyai martabat dan akan diperlakukan sebagaimana adanya, memperlakukan manusia sebagai manusia yang disebabkan oleh kemanusiaannya, bukan karena jenis kelamin, ras, suku, dan lain sebagainya.

3. Demokrasi sebagai persamaan (*equality*)

Demokrasi sebagai persamaan artinya setiap orang dalam kelompok masyarakat tertentu mempunyai hak yang sama. Sebab, sudah menjadi kesepakatan umum (*consensus*) bahwa manusia dilahirkan sama dalam hak dan kewajiban.

4. Demokrasi sebagai wahana untuk berbagi (*sharing*)

Demokrasi sebagai wahana untuk berbagi (*sharing*) dengan kelompok lain artinya kelompok mayoritas yang sedang berkuasa tetap mengharai kelompok minoritas dengan cara membagi kekuasaan. Hal ini dilakukan agar hak-hak minoritas tetap terjamin dengan membuka peran komunikasi antar Kelompok.

#### **D. Karakteristik Pembelajaran dengan Menerapkan Nilai Demokrasi**

Beberapa prinsip demokrasi pendidikan Islam yang tersebut di atas, sepintas dapat disimpulkan adanya beberapa ciri demokrasi dalam pendidikan Islam. Menurut Mujianto, suatu pendidikan Islam, dapat dikatakan demokratis bila bercirikan lima hal, yaitu:

1. Tingginya komitmen keilmuan
2. Menempatkan guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa sebagai subyek kependidikan yang sering berintegrasi, saling mengisi dan saling melengkapi.
3. Menempatkan pendidikan dan peserta didik secara proporsional : satu pihak sebagai penyampai ilmu dan lain penimba ilmu. Keduanya menghindari kecongkakan intelektual dan superioritas bagi guru serta imperioritas bagi murid.
4. Konsisten dengan prinsip belajar tuntas (*life long education*).

5. Tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, ada langkah-langkah kongrit estafet dan pengalaman ilmu.<sup>36</sup>

### **E. Teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran yang demokratis**

Banyak teori belajar yang dikembangkan oleh ahli pembelajaran. Diantara teori belajar yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan menerapkan nilai demokrasi antara lain :

1. Teori *Free Discovery Learning* dari Bruner

Bruner mengemukakan empat tema pendidikan, yaitu pentingnya arti struktur pengetahuan, kesiapan (*readiness*), nilai intuisi dalam proses pendidikan dan motivasi atau keinginan untuk belajar.<sup>37</sup>

Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut *Free Discovery Learning*, Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

Perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu *enaktif*, *ikonik*, dan *simbolik*.

2. Teori *Meaningful Learning* dari Ausubel

Menurut Ausubel, belajar merupakan asimilasi bermakna. Siswa mengasimilasi materi pelajaran dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam peristiwa pembelajaran tersebut diperlukan faktor motivasi dan pengalaman emosional, sebab tanpa motivasi dan keinginan yang kuat dari pihak pebelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Tant Mujiyanto, *Demokrasi Pendidikan*, Majalah Suara Muhammadiyah No. 22 Th. Ke-78, 16-30 November 1993. Hal. 48

<sup>37</sup> Ratna Willis Dahar., *Teori-teori Belajar*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 98.

<sup>38</sup> lihat Ausubel, D.P., *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*, (New York: Grune and Straton, 1968), hlm. 114-120.

### 3. Teori Perkembangan dari Piaget

Piaget mempelajari berfikir pada anak. Ia membahas tentang aspek perkembangan intelektual pada anak. Menurut Piaget ada tiga aspek perkembangan intelektual anak, yaitu struktur, isi dan fungsi.

Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi empat,<sup>39</sup> yaitu:

b. Tahap *sensori motor* (umur 0-2 tahun)

Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan, dan dilakukan langkah demi langkah.

c. Tahap *pra operasional* (umur 2-7/8 tahun)

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif.

d. Tahap *operasional konkret* (umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun).

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret.

e. Tahap *operasional formal* (umur 11/12-18 Tahun)

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir "kemungkinan". Model berpikir ilmiah dengan tipe *hipotheticodeductive* dan *inductive* sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis.

### 4. Teori belajar Vygotsky

Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sesuai dengan teori *sosiogenesis*, yaitu : dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat sekunder.

---

<sup>39</sup> Lihat Jean Piaget, *The Child's Conception of the World*, (Savage, Maryland: Littlefield Publishers, 1951), hlm. 78.

Artinya pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi ditekankan pada pentingnya peran aktif seseorang dalam mengonstruksi pengetahuannya.

Konsep-konsep penting teori *sosiogenesis* tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah teori hukum genetik tentang perkembangan (*genetic law of development*) dan zona perkembangan proksimal (*zone of proximal development*), dan mediasi.<sup>40</sup>

## **F. Model-model Pembelajaran yang dapat menerapkan nilai demokrasi**

Model atau metode pembelajaran yang diyakini sejalan dengan format pendidikan yang demokratis dan humanistik diantaranya sebagai berikut :

### **1. Active Learning Method**

Model ini dicetuskan oleh Melvin L. Silberman. Asumsi dasar yang dibangun dari model pembelajaran ini adalah bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa, melainkan membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus.<sup>41</sup>

### **2. Cooperative Learning**

Metode pembelajaran kooperatif dikembangkan salah satunya oleh Robert E. Selvin, dengan berpijak pada beberapa pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Pendekatan dimaksud adalah belajar aktif, konstruktivistik, dan kooperatif.

### **3. Independent Learning**

Pembelajaran mandiri diawali dengan konsep yang sangat sederhana, yakni bagaimana seorang guru bisa membangkitkan selera belajar peserta didik seperti ketika mereka sedang membutuhkan makan

---

<sup>40</sup> Lihat Lev Semyonovich Vygotsky, L.S. *Mind in Society*, (Cambridge: Harvard University Press, 1978), hlm. 1-34.

<sup>41</sup> M. Silberman, *Active Learning*, 101 *Strategi Pembelajaran Aktif*, Terj. Sarduli dkk (Yogyakarta : Yappendis, 2001). Hal. 2

atau minum. Model ini menawarkan cara belajar yang akan membawa siswa ke dunianya sendiri, yaitu belajar yang menyenangkan, bebas dan tanpa tekanan dari siapapun.

#### 4. Contextual Teaching and Learning

Pembelajaran Kontekstual (*contextual teaching and learning*) merupakan pembelajaran yang dapat memberikan dukungan dan penguatan pemahaman siswa dalam menyerap sejumlah materi pembelajaran serta mampu memperoleh makna dari apa yang mereka pelajari sehingga mampu menghubungkannya dengan kenyataan hidup sehari-hari.

#### 5. Pembelajaran Quantum

Dalam pembelajaran quantum berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Sebuah simfoni selain memiliki lagu, juga memiliki struktur dasar *cord*. Struktur dasar *cord* ini dapat disebut prinsip-prinsip dasar pembelajaran kuantum.

### **G. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Penerapan Nilai Demokrasi**

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi mengemukakan beberapa faktor pendukung dan penghambat terciptanya demokrasi pendidikan Islam.

#### **1. Faktor Pendukung**

*Pertama*, format politik. Pelaksanaan pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan agama (Islam) erat kaitannya dengan pola atau sistem secara format politik yang dianut oleh suatu bangsa. Hal mana pengertian format politik pada dasarnya merupakan suatu yang instrumental<sup>42</sup>

*Kedua*, persamaan dan kebersamaan. Memperlakukan masyarakat pendidikan pada posisi yang sama merupakan syarat mutlak terciptanya demokrasi pendidikan Islam.

---

<sup>42</sup> A.M Syaefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996. Hal. 41

*Ketiga*, kedewasaan intelektual dan emosional.<sup>43</sup> Kedewasaan intelektual akan mendorongnya untuk tidak sempit pandangan dalam mensikapi ranah perseteruan pemikiran yang berkembang. Sedangkan kedewasaan dan atau kematangan aspek emosional seseorang akan membentuk jiwa pribadi yang utuh dan tidak mudah dikotori oleh serpihan serpihan nepotisme, fanatisme, anarkisme, absolutisme, dan sebagainya.

## 2. *Faktor Penghambat*

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi mengutip apa yang dikemukakan oleh Dr. AM. Saefuddin dalam buah karyanya,<sup>44</sup> ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya laju perjalanan demokrasi pendidikan Islam.

*Pertama*, penyebab struktural. Penyebab struktural yang dimaksud adalah bahwa masyarakat pendidikan kita menganut budaya birokrasi yang bersifat intruksional.

*Kedua*, penyebab kultural. Kultural, gengsi dan cuek, koleksi dan koneksi, dan bahkan upeti dan korupsi yang merupakan gejala-gejala *deefisiensi jabatan* sudah tidak asing lagi didengar dalam *taman telinga* civitas akademik kita.

*Ketiga*, penyebab natural atau alamiah. Keadaan alam dan iklim suatu masyarakat tertentu kadang sulit *ditaklukan* dengan kobaran petasan transformasi informasi yang datang kepadanya.

*Keempat*, penyebab legal. Yakni sangat mungkin masih banyak yang menghambat terciptanya demokrasi dalam pembelajaran pendidikan Islam, seperti keterbelakangan, ketertinggalan, kebodohan, dan kesenjangan.<sup>45</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan nilai demokrasi banyak dikaitkan dengan matapelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, namun kebanyakan tentang penerapan pada siswa, lingkungan masyarakat atau disebuah tempat kerja. Sedangkan

---

<sup>43</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan*, Bandung : Mizan. 1993. Hal. 182

<sup>44</sup> AM. Syaefuddin, *Ijtihad Politik ...* Hal. 107-108

<sup>45</sup> Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma pendidikan ...*hal. 141 - 142

penelitian penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran nampaknya masih belum banyak dilakukan.

Diantara penelitian yang mengangkat nilai demokrasi adalah penelitian dari Rini Yuliana dengan judul “Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi yang diterapkan adalah : (1) Toleransi, (2) kerjasama, (3) kebebasan berpendapat, (4) kebebasan berkelompok, (5) menghormati orang lain, (6) kepercayaan diri dan (7) kesadaran akan perbedaan. Salah satu hal yang disarankan oleh penulis agar demokrasi lebih dihayati adalah : proses pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa yang belum aktif untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok maupun diskusi kelompok, menumbuhkan keberanian siswa untuk berani tampil didepan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai pembelajaran diperlukan proses yang dapat memungkinkan berkembangnya nilai demokrasi.

Penelitian lainnya tentang nilai demokrasi adalah penelitian yang berjudul: “Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-Kecamatan Depok” oleh Adisti Sulistyorini. Penelitian tersebut mengangkat beberapa komponen yang harus dikembangkan, yaitu tujuan, materi, strategi pengembangan, guru dan proses penilaian. Untuk mengetahui perubahan sikap dilakukan pada proses pembelajaran. Penelitian ini menekankan pada kemampuan guru mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila pada saat kegiatan pembelajaran PKn.

Sedangkan Penelitian Mazrur dengan judul : Pengaruh Contextual Teaching and Learning dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar pada Mata Peajaran Fikih di MTsN Palangka Raya”. Pada saat ujicoba dengan kegiatan pembelajaran menggunakan model CTL, walaupun tidak secara langsung menyoroti tentang penerapan nilai demokrasi, akan tetapi dalam analisisnya dikemukakan bahwa pada saat terjadinya diskusi sebagai salah satu langkah pembelajaran dalam CTL menetapkan prinsip belajar demokrasi, yaitu memperlakukan siswa dengan sama. Siswa diberikan hak yang sama untuk berpendapat, memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, menghargai dan menghormati martabat siswa, memperlakukan dengan adil serta bermusyawarah dalam memutuskan suatu pandangan. Guru tidak memaksakan kehendaknya, tapi memberikan pandangan dan pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran, sehingga siswa tidak merasa terpaksa dalam menerima pelajaran yang diberikan guru. Penelitian ini dilakukan dengan



uji coba, yaitu dengan merekayasa kelas menggunakan pembelajaran kontekstual dan ekspositori. Bagaimana jika tidak ada rekayasa, apakah guru melakukan tindakan yang demokratis dalam pembelajaran, atau dengan kata lain apakah menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih.

Ketiga penelitian tersebut di atas, memberikan suatu gambaran bahwa nilai demokrasi sudah ditanamkan dan dibiasakan pada siswa dalam kegiatan pembelajaran, namun belum ada yang secara khusus menyoroti menyoroti penerapan nilai demokrasi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Celah inilah yang nampaknya perlu diketahui dan disoroti, terlebih lagi pada mata pelajaran fikih yang memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pengetahuan, pandangan yang berbeda serta kebiasaan yang berbeda akibat pengalaman dan pembelajaran sebelumnya.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### **A. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif. Jika dilihat dari sisi strategi dan metode penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan studi deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis kegiatan pembelajaran fikih dengan menerapkan nilai demokrasi di Madrasah Tsanawiyah.

Sebagai penelitian deskriptif, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran fikih. Seberapa banyak nilai demokrasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran fikih dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah.

Diantara ciri penelitian kualitatif juga memiliki ciri yang didasarkan pada salah satu disiplin ilmu. Penelitian ini didasarkan pada disiplin paedagogik, yaitu penerapan nilai-nilai pendidikan bagi anak, karena pada dasarnya guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik siswanya agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan semua yang dipelajari.

### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Ibukota Kalimantan Tengah. Di Kota Palangka Raya terdapat 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MIN) dan 11 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS). Penelitian ini difokuskan pada MTsN Model 1 Palangka Raya dan satu buah MTs Muslimat NU Palangka Raya.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Antara lain: (1) Diambilnya kedua MTs tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam menganalisis data, karena pada MTsN Model 1 Palangka Raya termasuk MTs yang dikenal sebagai MTs yang memiliki kemajuan cukup pesat, memiliki jumlah guru dan murid yang cukup banyak, sehingga dalam kegiatan pembelajaran fikih memungkinkan lebih baik dari MTs lainnya di Kota Palangka Raya, sedangkan MTs Muslimat NU adalah sebuah MTs yang jika dibandingkan dengan MTs swasta lainnya, termasuk yang lebih maju sehingga memungkinkan untuk memiliki guru yang sudah menerapkan model-model pembelajaran

yang variatif; (2) Latar belakang pendidikan guru mata pelajaran fikih di kedua MTs tersebut sudah sesuai dengan persyaratan formal, yaitu berpendidikan Strata 1 jurusan Pendidikan Agama Islam, sehingga memungkinkan untuk dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kerangka teori pembelajaran; (3) Dengan diambilnya dua MTs sebagai lokasi penelitian ini, diharapkan memberikan gambaran cara guru fikih di MTs dalam menerapkan nilai demokrasi khususnya dalam pembelajaran fikih; (4) Perbedaan pandangan (mazhab) antar guru dengan siswa (latar belakang pandangan keluarga) kadang mempengaruhi terhadap penilaian dan cara guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, oleh karena itu dengan diambilnya dua MTs, yaitu MTs Muslimat NU yang umumnya berlatar pada penganut satu aliran atau faham tertentu, sedang di MTsN bersifat umum, dengan siswa yang ada dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Siswa yang akan diteliti adalah kelas I, akan diambil masing-masing satu kelas untuk MTs Muslimat NU dan MTsN Model 1 Palangka Raya. Siswa kelas I sudah memasuki usia sekitar 12 atau 13 tahun. Pada usia ini menurut Piaget sudah masuk pada “tahap operasional formal”, pada tahap ini anak sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola fikir “kemungkinan”. Model berfikir ilmiah sudah mereka miliki, anak sudah memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis. Jika pada kelas ini diterapkan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan nilai demokrasi, maka anak didik sudah dapat mencerna dan jika dibimbing oleh guru dengan baik, akan dapat menghargai perbedaan.

### **C. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang akan digali dalam penelitian ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran fikih yang menerapkan nilai demokrasi. Data tersebut akan digali pada kedua MTs dengan sumber data berupa manusia dan non manusia.

Data primer bersumber pada guru dan siswa dalam proses pembelajaran fikih, sedang data sekunder bersumber dari kepala madrasah, penilik/supervisor dan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Sumber data yang berupa non manusia berupa dokumen, rencana pelaksanaan pembelajaran dan catatan tertulis yang berkaitan dengan pembelajaran fikih.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti. Instrumen lainnya yang non manusia juga digunakan, tetapi fungsinya untuk mencari data awal, sebagai triangulasi dan sebagai cara untuk mencari data pendukung dalam kegiatan penelitian. Adapun teknik utama yang digunakan adalah observasi, yaitu mengamati secara intensif kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam mata pelajaran Fiqih. Di dalam kelas mengamati cara mengajar guru, penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran Fiqih, keadaan siswa dan hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran di kelas.

Teknik wawancara terhadap guru yang digunakan ada dua bentuk, yaitu wawancara terarah yang juga disebut wawancara terfokus (*focused interview*) dan wawancara tidak terarah atau wawancara bebas (*free interview*). Kedua bentuk wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan guru tentang pembelajaran yang menerapkan nilai demokrasi, alasan menggunakan model pembelajaran, permasalahan yang dialami dalam pembelajaran fikih, cara menghadapi pendapat dan pandangan siswa yang berbeda dan pengalaman lainnya dalam kegiatan pembelajaran fikih.

Di samping itu dilakukan pula wawancara terhadap siswa diantaranya untuk mengkroscek informasi yang didapat dari guru, juga aktifitas siswa dalam pembelajaran fikih, kebiasaan pengamalan keagamaan di rumah, latar belakang kehidupan keluarga, pandangan siswa terhadap cara guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran fikih, dan aktifitas belajar yang disukai dan tidak disukai.

Teknik lain yang digunakan adalah dokumentasi, terutama untuk mengetahui rencana persiapan mengajar guru, data guru dan siswa. Dengan dokumentasi juga dapat mengetahui keadaan MTs secara keseluruhan.

#### **D. Analisis Data.**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif konseptual, yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh di lapangan, kemudian dibangun konsep-konsep atau proposisi-proposisi ke arah pengembangan suatu teori substantive. Teori tersebut bertolak dari data dan dicerna dengan pengetahuan dan pengalaman masa lalu.

Tipe dasar proposisi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu

generalisasi empirik dan hipotesis. Generalisasi empirik bertolak dari data, sedang hipotesis dikembangkan dari perbandingan data empirik dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan. Dengan menggunakan kedua proposisi ini akan dibuat temuan teoritik.

Pelaksanaan analisis berlangsung selama penelitian (di lapangan) dan sesudah meninggalkan lapangan. Selama di lapangan peneliti mengembangkan pertanyaan analitik dan menganalisis kejadian yang perlu diamati, menggunakan komparasi konstan dan membuat catatan lapangan. Setelah meninggalkan lapangan peneliti menentukan satuan informasi, pengkategorian, penafsiran dan pengembangan proposisi.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Visi dan Misi serta Keadaan Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya**

##### **1. Visi, Misi dan Tujuan MTsN 1 Palangka Raya**

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palangka Raya adalah madrasah tsanawiyah yang banyak diminati calon siswa di Kota Palangka Raya. Visi yang dimiliki MTsN 1 Kota Palangka Raya adalah “terwujudnya insan berakhlak karimah yang unggul dan berprestasi”. Indikator visi itu adalah : (a) Disiplin dalam melaksanakan ibadah, (b) saling menghormati antar warga negara, (c) madrasah berwawasan lingkungan, (d) berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi MTsN 1 Kota Palangka Raya sebagai berikut: (a) memperkuat keimanan dengan membiasakan disiplin beribadah, (b) internalisasi dan korelasi nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran dan sikap serta perilaku sehari-hari, (c) membudayakan sikap empati antar warga madrasah, (d) menegakkan tata tertib madrasah, (e) membiasakan sikap peduli terhadap lingkungan untuk seluruh warga madrasah, (f) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, (g) mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai tingkat pendidikan dasar bagi peserta didik, (h) membekali peserta didik dengan keterampilan yang memadai, (i) menggali dan mengasah potensi peserta didik sehingga mampu berprestasi, (j) meningkatkan hubungan yang harmonis antar stakeholder yang terkait, (k) memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, (l) meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana madrasah.

## 2. Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di MTsN 1 Palangka Raya

Siswa MTsN 1 Kota Palangka Raya secara keseluruhan berjumlah 673 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 258 orang dan perempuan sebanyak 415 orang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### Rekap Jumlah Siswa MTsN 1 Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2017/2018

#### 3.

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	VII – 1	16	23	39
2	VII -2	14	25	39
3	VII – 3	16	23	39
4	VII – 4	7	31	38
5	VII – 5	12	27	39
6	VII – 6	16	23	39
7	VIII – 1	20	18	38
8	VIII – 2	21	17	38
9	VIII – 3	19	18	37
10	VIII – 4	10	27	37
11	VIII – 5	16	21	37
12	VIII – 6	18	18	36
13	IX - 1	12	24	36

14	IX - 2	11	26	37
15	IX - 3	12	24	36
16	IX - 4	13	23	36
17	IX - 5	13	23	36
18	IX - 6	12	24	36
	<b>Jumlah</b>	<b>258</b>	<b>415</b>	<b>673</b>

Sumber: TU MTsN 1 Kota Palangka Raya tahun 2017

Guru yang mengajar di MTsN1 Palangka Raya berjumlah 40 orang,  
denga rincian sebagai berikut :



**Tugas Guru di MTsN 1 Kota Palangka Raya  
Tahun Ajaran 2017/2018**

No	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Pangkat	Pend/Jurusan	Tugas Mengajar	Tugas lain
(1)	(2)	(6)	(8)	(10)	(12)
1	Rita Sukaesih, S.Pd, M.Si NIP. 19740521 199903 2 003	IV/a	IPA	Biologi	Kepala Madrasah
2	Asnifah, S.Ag NIP. 19571023 198603 2 001	IV/a	PAI	SKI	Walikelas VIII-4
3	Heli Normala, S.Pd NIP. 19670525 198901 2 002	IV/b	FKIP/BIN	Bahasa Indonesia	Walikelas IX-1
4	Slamet Budi S, S.Pd NIP. 19690510 199402 1 001	IV/a	FISIKA	IPA (Fisika)	Walikelas VIII-2
5	Dra. Hj. Pateriana NIP. 196710231994032001	IV/a	PAI	Bahasa Inggris	-
6	Hj.Radiyah, S.Ag NIP. 19690214 199703 2 001	IV/a	S1 PAI	Fiqih	Walikelas IX-2
7	Drs. Misbakhul Munir NIP. 19690613 199802 1 001	IV/a	IPS EKO.	IPS	Walikelas VIII-3
8	Sugito, S.Pd NIP. 19690101 199802 1 001	IV/a	PPKN	PKn	-
9	Kurniasih, S.Ag NIP. 19710726 199903 2 004	IV/a	PAI	Akidah Akhlak	Wakamad Kurikulum
10	Sabur, S.Pd NIP. 19720225 199503 1 001	IV/a	FKIP/PGSD	Bahasa Indonesia	Wakamad Humas
11	Riwut Sinta Hawini, S.Pd NIP. 19731113 199512 2 002	IV/b	MTK	Matematika	Walikelas VII-5
12	Yully Dwi Astuti, S.Pd	IV/a	B.ING	Bahasa Inggris	Walikelas VII-2

	NIP. 19730716 200012 2 001				
13	Fitrathiyah, S.Pd.I NIP. 19720915 199403 2 003	IV/a	PAI	Fiqih SKI	Walikelas VII-4
14	Sumarno, S.Pd NIP. 19750101 200312 1 006	IV/a	IPS EKO.	IPS	Walikelas VII-1
15	Nur Hapsyah, S.Pd NIP. 19750316 200112 2 001	IV/a	BIOLOGI	IPA (Biologi) Prakarya	Wakamad Kesiswaan
16	Hj.Jubaidah, S.Ag, M.S.I NIP. 19691212 200312 2 003	IV/a	BAR	Bahasa Arab	-
17	Ervina, S.Pd NIP. 19771220 200212 2 002	IV/a	MTK	Matematika	Kepala Perpustakaan
18	Hayatun Nissa, S.Pd NIP. 19801231 200501 2 016	III/d	B. INDO	Bahasa Indonesia	Kepala Laboratorium
19	Slamet, S.Pd NIP. 19710828 200501 1 007	III/d	PENJASKES	Olah Raga	Walikelas VIII-1
20	Nanki Rahmawati, S.Pd NIP. 19750103 200501 2 007	III/d	B.INDO	Bahasa Indonesia	Walikelas VIII-5
21	Aris Purnomo, S.Pd NIP. 19760526 200501 1 004	III/d	BK	BK	-
22	Agus Widaryanto, S.Pd NIP. 19750316 200112 2 001	III/d	IPS AKUN.	IPS	Wakamad Sarana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Eny Listyowati, S.Pd NIP. 19710303 200501 2 007	III/d	MTK	Matematika	Walikelas IX-4
24	Isna Indriati, M.Pd NIP. 19810529 200501 2 008	III/d	B. ING	Bahasa Inggris	Walikelas IX-5
25	Mursalim, S.Pd	III/d	Matematika	Matematika	Walikelas VIII-6

	NIP. 19780715 200501 1 005				
26	Sri Suwanti, S.Pd NIP. 196711272005012001	III/d	PKKN	PKn	Walikelas VII-6
27	Noorsibae, SP NIP. 19680126 200604 2 002	III/d	Sosial Ekonomi Pertanian	IPA	Walikelas VII-3
28	M. Amin, S.Ag NIP. 19710307 200312 1002	III/d	PAI	SKI	-
29	Kartiah, S.Pd NIP. 19781212 200312 2 003	III/d	Matematika	Matematika	-
30	Tri Murni Handayani, S.Pd, M.Sc NIP. 19810131 200501 2 007	III/c	S1 Biologi	IPA (Biologi)	Walikelas IX-3
31	Sumarni, S.Pd NIP. 19610216 199003 2 002	III/c	BK	BK	-
32	Amila Fitriani, S.Pd NIP. 19711117 201412 2 003	III/a	BAR	Ekonomi Koperasi	Walikelas IX-6
33	Moh. Ali Muttaqo, S.Pd.I NIP. 19851015 200501 1 001	III/a	PAI	Quran Hadist	Koordinator Agama
34	Rasno	-	STM	Seni Budaya	-
35	Akhmad Kardiyanto, S.Pd.I	-	Tarbiyah	Aqidah Akhlaq	-
36	Mardani, S.Pd	-	Penjaskes	Penjaskes	-
37	Ayu Dwitarsi, S.Pd.I	-	B. Inggris	B. Inggris	-
38	Nurmilasari, S.Pd	-	B. Indonesia	Penjaskes	-

39	Norhidayasi, S.Pd	-	B. Indonesia	B. Indonesia	-
40	Muhammad Nur Fathan	-	S1 Ekonomi Syariah	Bahasa Arab	-

Sedangkan Tenaga Kependidikan di MTsN 1 Kota Palangka Raya sebanyak 16 orang dengan rincian tugas sebagai berikut :

**Tugas Tenaga Kependidikan di MTsN 1 Kota Palangka Raya  
Tahun Ajaran 2017/2018**

No	N A M A	Gol./ Ruang (kode)	Ijazah tertinggi		Jabatan/ Tugas
	Nomor Induk Pegawai (NIP)		Jurusan	Thn	
1	2	6	8	9	10
1	Gazali, BA NIP. 19610420 199203 1 001	III/c	Agama	1985	Kepala Urusan Tata Usaha
2	Rudi Yulianto, SE NIP. 19750724 200501 1 005	III/c	Ekonomi	2002	Pelaksana Tata Usaha
3	Hj. Nurpaduaty NIP. 19601227 198303 2 002	III/b	SMEAN	1980	Pelaksana Tata Usaha
4	Zuliah, S.Sos.I NIP. 19810718 200501 2 013	III/b	Sosial	1998	Bendahara Pengeluaran

5	Bawirati NIP. 19630517 199001 2 001	III/b	SMA	1985	Pelaksana Tata Usaha
6	I l m i NIP. 19720505 200710 1 008	II/a	MAN	1993	Pelaksana Tata Usaha
7	As' ari NIP. 19710310 201411 1 001	II/a	SMA	1989	Pelaksana Tata Usaha
8	Dewi Sapala Sartika, A.Md	0	D III	2002	Pelaksana Tata Usaha
9	Firdaus, S.Sos	0	Sosial	2008	Pelaksana Tata Usaha
10	Ria Dwi Sawitri	0	DIII IP II	2017	Petugas Perpustakaan
11	Kastanto	0	SMK	2004	Jaga Malam
12	Redy Satria	0	SMA	2003	Satpam
13	Masdani	0	SMP	1989	Kebersihan
14	Siti Mastini	0	SD	1993	Kebersihan
15	Aspiani	0	SMA	1996	Kebersihan
16	Tommy Budianto	0	SMA	2008	Taman

**B. Visi dan Misi serta Keadaan Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muslimat NU Palangka Raya**

**1. Visi, Misi dan Tujuan MTs Muslimat NU**

Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU Palangka Raya mempunyai visi yakni “Terwujudnya Warga Madrasah yang Beriman, Berilmu, Beramal, Bertakwa dan Populis.” Sedangkan misinya adalah: (a) Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan; (b) Meningkatkan Pelaksanaan bimbingan dan Penyuluhan; (c) Meningkatkan Hubungan Kerjasama Orangtua Siswa dan Masyarakat; dan (d) Meningkatkan Tata Usaha, Rumah Tangga Madrasah, Perpustakaan dan Laboratorium.

Di samping visi dan misi, MTs Muslimat NU juga memiliki tujuan, yakni: (a) Terwujudnya warga madrasah yang memiliki ilmu agama Islam dan teguh dalam iman; (b) Terbiasa taat beribadah dan beramal sholeh; (c) Terciptanya lingkungan madrasah yang Islami, penuh kasih sayang antar sesama; (d) Terlaksananya proses pembelajaran yang optimal; (e) Terlaksananya tata tertib madrasah bagi guru dan peserta didik; (f) Unggul dalam Persaingan masuk kejenjang MA/SMA/SMK; (g) Unggul dalam Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama dalam Bidang Sains dan Matematika; (h) Unggul dalam Lomba Olah Raga, Kesenian, PMR dan Pramuka; (i) Unggul dalam Kegiatan Keagamaan dan Kepedulian Madrasah; (j) Unggul dalam memperoleh nilai Ujian Nasional (UN); dan (k) Unggul dalam Kebersihan dan Penghijauan Madrasah.

## 2. Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan di MTs Muslimat NU

Jumlah siswa MTs Muslimat NU secara keseluruhan berjumlah 358 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 174 orang dan perempuan sebanyak 184 orang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### Rekap Jumlah Siswa MTs Muslimat NU Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	VII A	24	16	40
2	VII B	23	17	40
3	VII C	19	21	40
4	VIII A	23	17	40
5	VIII B	24	16	40
6	VIII C	10	29	39
7	IX A	16	24	40
8	IX B	19	20	39
9	IX C	16	24	40
	Jumlah	174	184	358

Sumber: TU MTs Muslimat NU Palangka Raya tahun 2017

Adapun guru yang mengajar di MTs Muslimat NU saat ini berjumlah 20 orang, dan dibantu oleh 1 orang TU, 1 orang pengelola perpustakaan dan 1 orang petugas kebersihan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Guru dan Tenaga TU MTs Muslimat NU Palangka Raya  
Tahun Ajaran 2016/2017**

No	Nama	NIP	Pend./Jurusan	Tugas Tambahan
1	Rita Sukaesih, S.Pd., M.Si	19740521 199903 2 003	S2 / Biologi	Kepala Madrasah
2	Titin Kartika Agustina, S.Pd	19750815 199903 2 001	S1 / MIPA. Matematika	Wakamad Kur. & Pengajaran
3	Rahimah, S.Ag	19710106 200604 2 019	S1 / PAI	Wakamad Kesiswaan
4	Rina Rusmalina, S.Ag., M.Pd	19720201 199703 2 004	S2 / PLS	Guru
5	Trini Roestiani Juniar, S.Pd	19720623 200012 2 001	S1 / Bahasa Inggris	Guru
6	Dra. Rahmawati	19660126 199803 2 001	S1 / PAI	Guru
7	Maisarah, S.Ag	19740717 200501 2 006	S1 / PAI	Guru
8	Sapta Rini, S.Pd	19730617 200501 2 006	S1 / Bahasa Indonesia	Guru
9	M. Rif'at, S.Pd	19730609 199803 1 002	S1 / BK	Guru
10	Lilik Supatmi, S.Pd	19770626 200312 2 002	S1/ Fisika	Guru
11	Hasma, S.Ag	19750803 200604 2 030	S1 / PAI	Guru
12	Elvi Sidabutar, S.Pd	19821129 200604 2 019	S1 / Ekonomi	Guru
13	Mashudi, S.Ag.	-	S1 / PAI	Guru
14	Syamsuddin, S.Ag.	-	S1 / Syari'ah	Guru
15	Jamilah, SE., M.Si	-	S2 / Ekonomi	Guru
16	Suryadi, S.Pd. I	-	S1 / PAI	Guru
17	Fahzur Akbar, S.Pd.I	-	S1 / Tarbiyah Biologi	Guru



18	Jaka Lesmana, S.Pd.I	-	S1 / Tarbiyah Fisika	Guru
19	Hamdan, S.Pd.I	-	S1/Bahasa Inggris	Guru
20	Rahmatul Insyirah, S.Pd.I	-	S1/PAI	Guru
21	Siti Nurjannah	-	MAN	Pengelola Perpustakaan
22	Ari Hermanto	-	SMA	Tata Usaha (TU)
23	Halimatusabdiyah	-	SMA	Petugas Kebersihan

Sumber: TU MTs Muslimat NU Palangka Raya tahun 2017

### C. Pembelajaran Fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya

Data tentang pembelajaran fikih di MTsN 1 dan Muslimat NU Palangka Raya ini didapatkan melalui observasi dan dokumen. Sebelum kegiatan observasi dilakukan peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran fikih yang dibuat oleh guru di kedua MTs tersebut. Dokumen tersebut berupa Silabus, Program semester dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Dari dokumen tersebut didapatkan bahwa kegiatan pembelajaran fikih yang akan dilaksanakan pada saat dilaksanakannya observasi adalah materi shalat. Hal ini sesuai dengan jadwal mengajar pada kedua madrasah tersebut dan kesempatan yang ada pada peneliti. Di samping itu dalam pembelajaran fikih materi shalat memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan jika guru memberikan kesempatan untuk berfikir dan bertindak secara bebas bagi peserta didiknya. Dengan demikian nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih memungkinkan untuk dikembangkan baik dari aspek metodologi maupun pada aspek materi.

Berdasarkan RPP yang dibuat oleh kedua madrasah tersebut, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kelas dengan materi bahasan shalat dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan pertama pembahasan

tentang ketentuan-ketentuan shalat yang meliputi : rukun shalat, syarat sah shalat, sunat shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat. Sedang pertemuan kedua berkaitan dengan praktek shalat.

## **1. Kegiatan Pembelajaran Fikih di Kelas VII MTsN 1 Palangka Raya**

### Pertemuan I

Kegiatan pembelajaran fikih di kelas VII dialokasikan waktunya 2 X 40 menit. Pertemuan pembelajaran ini sudah ditentukan materi yang akan dipelajari adalah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan shalat, yaitu : pengertian shalat, dalil-dalil disyariatkannya shalat, syarat sah, syarat wajib, rukun, sunat dan hal-hal yang membatalkan shalat.

Sebagaimana kegiatan pembelajaran pada umumnya, guru mengadakan kegiatan pra instruksional dengan menertibkan siswa sambil mempersiapkan suasana pembelajaran. Kemudian mengintroduksi bahan dan mengadakan appersepsi.

Pembelajaran kali ini guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada setiap sub materi guru menjelaskan satu persatu masing-masing bagian dari materi tersebut sambil diselingi dengan pertanyaan. Pertanyaan guru ada yang dijawab perorangan kemudian dilemparkan lagi pada yang lain, namun ada juga yang dijawab secara beramai-ramai. Misalnya pada saat guru menjelaskan syarat wajib shalat. Guru menyebutkan syarat wajib berikutnya adalah tidak dalam keadaan haid atau nifas. Apa itu haid, siswa menjawab secara bersama-sama, demikian juga pada saat ditanya apa itu nifas, siswa juga menjawab secara bersama-sama.

Pada penjelasan berikutnya tentang syarat wajib shalat adalah berakal. Guru menanya apa lagi syarat wajib berikutnya. Para siswa masing-masing melihat buku paketnya. Beberapa siswa ada yang angkat tangan. Guru menunjuk kepada salah seorang siswa, coba kamu, apa ? tanya guru. Siswa yang ditunjuk tadi menjawab. Berakal, bu. Guru melanjutkan pertanyaan bagaimana kalau orang gila, apa wajib shalat. Siswa terdiam sejenak, lalu ada yang mengangkat tangan. Saya bu. Tidak wajib shalat, kata siswa tadi. Coba

yang lain lagi kenapa orang gila tidak wajib shalat. Pada pertanyaan ini nampaknya guru ingin mengajak anak didiknya untuk menganalisis penyebab orang gila tidak wajib shalat. Siswa-siswa yang ditunjuk guru (terutama yang mengangkat tangan) diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Apa yang dilakukan oleh guru berhasil membuat siswanya memberikan alasan yang beragam. Keragaman itu ada yang esensinya berbeda, namun ada pula yang hanya redaksinya berbeda.

Pola seperti ini juga digunakan guru pada saat membahas sub bahasan lainnya. Guru menggunakan cara yang hampir sama pada saat memberikan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan shalat, baik yang berkaitan dengan syaratwajib shalat, rukun, sunat maupun hal-hal yang membatalkan shalat. Terkadang juga ditambahkan lagi dengan penjelasan setelah ada jawaban dari siswa atau pada saat siswa tidak ada yang menjawab.

Kesempatan yang diberikan oleh guru untuk melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran itu nampaknya dapat membuat siswa tidak hanya mendengar, tapi juga aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, walaupun ada beberapa siswa yang terkadang mengalihkan perhatiannya pada yang lain, misalnya bicara dengan teman, namun seringkali pembicaraan tersebut juga menyangkut materi yang sedang dipelajari. Pada saat ada perilaku siswa yang tidak memperhatikan pelajaran, guru menanyakan pada siswa ada apa, nak. Dari teguran guru itu ada dua kemungkinan yang dilakukan siswa. Kemungkinan pertama siswa kembali memperhatikan pelajaran, jika pada saat ditegur siswa tersebut tidak konsentrasi pada pelajaran. Kemungkinan kedua adalah siswa malah bertanya. Hal ini apabila siswa terlihat mengalihkan perhatian pada yang lain, misalnya menanya teman, melihat buku atau sedang menulis. Pada saat ditanya ada apa, siswa malah bertanya atau berpendapat. Guru juga tetap memperhatikan pertanyaan atau pendapat siswa tadi sambil menyampaikan pada siswa lainnya bahwa tentang pendapat siswa tersebut. Dengan demikian apa yang dikemukakan siswa dapat lebih jelas dipahami oleh siswa lainnya.

Dalam kegiatan pembelajaran ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pandangan atau pendapat yang berbeda dari siswanya, namun nampaknya semua siswa memiliki pengalaman yang sama dalam melaksanakan shalat. Misalnya pada saat guru menjelaskan tentang rukun shalat. Guru menyebutkan tentang niat. Kemudian guru menanya pada kelas. Bagaimana niat itu, misalnya shalat magrib. Secara serempak siswanya menyebutkan lafaz niat magrib dalam bahasa arab, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Setelah itu guru berdiam sejenak, kemudian mengatakan pada siswanya bahwa niat itu di dalam hati, yang kalian ucapkan itu adalah lafaz niat. Nampaknya semua siswa sudah hafal dengan lafaz niat. Ini menunjukkan bahwa semua siswa pada saat mau shalat selalu didahului dengan membaca lafaz niat “ushalli... “ dan seterusnya.

Demikian juga pada saat disuruh melafalkan bacaan do'a iftitah, ruku' dan sujud, semua bacaan siswa seragam. Guru menanya apa ada yang menggunakan bacaan lain. Tidak seorangpun diantara siswa yang mengucapkan berbeda. Walaupun guru menanya beberapa kali dan mengatakan “ayo, kan masih ada bacaan lain”, tapi tidak seorang yang mengucapkan bacaan yang berbeda. Indikasi ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pengalaman dan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang memungkinkan berbeda pandangan dan bacaan shalat. Atau bisa juga karena tidak berani mengungkapkan pendapat atau bacaan yang berbeda.

Sebenarnya pelajaran tentang shalat ini sudah dipelajari oleh siswa pada saat mereka berada di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, bahkan bagi siswa tertentu juga sudah belajar dan melaksanakan shalat pada saat di Taman Kanak-kanak, di lingkungan keluarga atau ditempat lainnya. Lingkungan tempat belajar anak tentunya mempengaruhi terhadap pandangan, pendapat dan kebiasaan anak, namun ternyata tidak terdapat perbedaan yang mendasar, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengemukakan jika terdapat perbedaan.

Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, guru mengecek kembali penguasaan siswanya terhadap materi yang sudah dipelajari (postest) serta menyampaikan beberapa nasehat terkait dengan materi yang sudah dipelajari.

## Pertemuan II

Tatap muka kedua dalam pembelajaran fikih dengan materi shalat ini juga dilaksanakan dengan durasi waktu 2 X 40 menit atau 80 menit. Hal ini karena pelajaran fikih dilaksanakan pada hari yang sama dan jam yang sama pada setiap minggu. Dengan kata lain, pertemuan tatap muka untuk mata pelajaran fikih dilaksanakan satu minggu dua jam pelajaran pada hari dan jam yang sama.

Pada pertemuan pertama dilaksanakan di kelas, namun pada pertemuan kedua materi shalat dilaksanakan di Mushalla. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya adaah siswa dapat mempraktekkan gerakan dan bacaan shalat dengan baik dan benar.

Pada kegiatan pembelajaran tersebut guru memulai dengan penjelasan bahwa secara bergiliran para siswa akan mempraktikkan gerakan shalat sebanyak 2 (dua) rakat disertai dengan bacaan yang dizahar atau dikeraskan semua bacaannya, sehingga siswa lainnya bisa mendengar. Semua siswa harus memperhatikan dan mencermati gerakan dan bacaan dari kawannya yang sedang melaksanakan shalat. Jika ada gerakan atau bacaan yang shalat atau keliru, maka setelah selesai kawannya mempraktekkan shalat, siswa lainnya boleh mengoreksi dan atau memberikan saran tentang hal-hal apayang harus diperbaiki oleh kawannya yang salah. Semua siswa nampaknya sudah memahami penjelasan gurunya.

Dimulailah satu persatu siswa yang diberi giliran oleh guru untuk maju kedepan untuk melaksanakan gerakan shalat disertai bacaannya. Setelah satu orang selesai melaksanakan shalat, siswa lainnya ada yang mengangkat tangan untuk mengoreksi apa yang dilakukan temannya. Dia menyampaikan kekeliruan yang dilakukan oleh temannya dalam

melaksanakan gerakan dan bacaan shalat. Kemudian terjadilah diskusi antar siswa yang sudah melaksanakan shalat dengan siswa lainnya.

Kegiatan pembelajaran yang demikian menunjukkan adanya kebebasan yang diberikan guru untuk mendiskusikan dan saling bertukar pendapat, bertukar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Terkadang ada pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh siswa, tentunya disertai dengan alasan yang bermacam-macam. Misalnya pada saat membaca tahiyat, ada siswa yang telunjuknya tegak dari awal tahiyat, tapi ada yang punya pandangan bahwa pada saat tahiyah telunjuknya ditegakkan pada saat membaca syahadat. Pandangan seperti ini diberikan kesempatan oleh guru untuk mengemukakan masing-masing alasan, setelah itu dijelaskan oleh gurunya kenapa terjadi perbedaan pandangan tersebut. Hal ini tentu memperkaya wawasan pengetahuan siswa, disamping cara yang digunakan mengajarkan kepada siswa bahwa setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda sekalipun dalam hal ibadah, terlebih lagi pada persoalan lainnya.

Praktek secara bergiliran ini diambil oleh guru secara acak, terkadang laki-laki terkadang perempuan, namun semua siswa sudah siap untuk melaksanakan shalat dan aktif memperhatikan temannya yang sedang praktek. Kegiatan tersebut berulang sampai habis waktu 2 jam pertemuan.

## **2. Kegiatan Pembelajaran Fikih kelas VII di MTs Muslimat NU Palangka Raya**

### **Pertemuan I**

Sebagaimana RPP yang sudah disiapkan bahwa pertemuan pertama mempelajari tentang pengertian shalat, dalil-dalil yang berkaitan dengan disyariatkannya shalat 5 waktu, syarat sah, syarat wajib, rukun, sunat dan hal-hal yang membatalkan shalat.

Setelah guru menertibkan siswa, maka guru memulai dengan bercerita tentang keistimewaan shalat. Guru menyampaikan bahwa shalat sangat

penting. Kadang orang hanya berniat untuk selalu melaksanakan shalat saja, sudah banyak yang mendapatkan berkah. Apalagi dengan melaksanakannya, tentunya banyak sekali faedah dan manfaatserta berkah yang didapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian guru melanjutkan pembicaraannya bahwa ia ingin menceritakan tentang shalat. Nampaknya siswa tidak sabar ingin mendengarkan cerita guru. Sebagian siswa menanya “cerita apa bu”. Kalau sudah siap semua dengarkan baik-baik cerita saya, kata guru.

Ada seorang suami yang mau berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Isterinya berpesan pada suaminya agar jangan lupa melaksanakan shalat, padahal si suami tadi dalam melaksanakan shalat hanya bisa melakukan gerakannya saja, sedang bacaannya masih banyak yang belum hafal. Pergilah si suami tadi ke kota dengan berjalan kaki. Sebelum sampai di kota waktu sudah senja. Si suami teringat dengan pesan isterinya agar selalu melaksanakan shalat. Tiba-tiba ia melihat sebut rumah yang ada di pinggir jalan. Si suami berenti sejenak dan berfikir, apakah ini rumah orang yang beraga Islam atau tidak. Dia mencoba memberanikan diri untuk minta izin agar dapat melaksanakan shalat di rumah tersebut. Si suami tadi mengetuk pintu dan menyampaikan niatnya. Pemilik rumah mempersilahkan shalat, bahkan tuan rumah ingin menjadi makmum. Selesai shalat, si suami tadi disuguhi makanan enak dan diberi kesempatan untuk bermalam serta disediakan kamar yang bagus. Dia berfikir. Andaikan tidak shalat, saya tidak mungkin mendapatkan pelayanan tuan rumah yang demikian.

Cerita ini disampaikan dalam rangka membuka pembelajaran agar siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya guru memberikan komentar terhadap isi cerita tadi, lalu menanyakan pada siswa tentang apa hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut. Masing-masing siswa memberikan tanggapan dan mengungkapkan hikmah yang bermacam-macam dari cerita tersebut. Kemudian guru menyimpulkan dan memberi stresing terhadap komentar siswa.

Langkah mengajar berikutnya, guru menyuruh siswa untuk membaca buku paket yang sudah ada pada siswa tentang syarat wajib shalat.

Dilanjutkan dengan siswa lainnya untuk membaca rukun shalat, syarat sah shalat, kemudian hal-hal yang membatalkan shalat.

Pada tahap berikutnya, guru membagikan kartu berwarna kuning dan berwarna hijau. Kartu kuning bertuliskan judul sub bahasan tentang shalat, yaitu pengertian shalat, syarat wajib shalat, syarat sah shalat, rukun shalat, sunat shalat serta hal-hal yang membatalkan shalat. Sedangkan kartu yang berwarna hijau adalah rincian atau bagian dari sub pokok bahasan tadi. Kartu yang dibuat guru tersebut sesuai dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas, sehingga setiap siswa mendapatkan satu kartu.

Bagi siswa yang mendapatkan kartu kuning diminta berdiri di depan dan memperlihatkan tulisan yang berisi sub bahasan yang berkaitan dengan shalat tadi. Kemudian siswa lain yang memiliki kartu hijau diminta untuk bergabung dengan temannya untuk menyingkronkan antara apa yang tertulis pada kartu kuning dengan kartu hijau. Keadaan kelas jadi ramai karena masing-masing siswa mencari pasangannya dan mengurutkannya.

Pada tahap berikutnya siswa yang sudah berkelompok sesuai judul sub bahasan, kemudian guru memberikan lembaran kertas berwarna putih yang lebih lebar untuk menempelkan kartu tadi sesuai dengan urutannya.

Masing-masing kelompok mengerjakan tugas tersebut sambil berdiskusi. siswa saling memberikan masukan, mana urutan yang benar. Kalau kartu yang dia miliki tidak termasuk pada kelompok tersebut, maka dia bisa pindah pada kelompok lain yang sesuai dengan isi/tulisan yang ada di kartu yang dimilikinya. Pada saat mengerjakan tugas tersebut, siswa harus saling memahami, saling memberikan masukan, toleran dalam berpendapat atau tidak menonjolkan pendapat sendiri dan diajarkan untuk bekerjasama. Pada saat terjadi perbedaan pendapat, mereka juga bisa membuka buku paket untuk melihat jawaban yang benar. Secara tidak langsung para siswa yang terdapat pada satu kelompok sudah mengadakan pembagian tugas, ada yang mengoleskan lem, ada yang mencocokkan urutan dan lain sebagainya.



Setelah selesai menyusun urutan materinya, siswa diminta duduk berkelompok sesuai dengan kelompok sub bahasan yang telah dikerjakan. Kemudian guru secara bergiliran.

## Pertemuan II

Pada pertemuan kedua ini tujuan yang ingin di capai dalam pembelajaran adalah siswa dapat mempraktekkan shalat dengan benar. Praktek yang dimaksudkan dalam materi pelajaran shalat ini adalah praktek gerakan dan praktek bacaan. dengan kata lain praktek yang dimaksudkan dalam tujuan pembelajaran ini adalah praktek gerakan shalat yang disertai dengan bacaan, termasuk juga kesesuaian antara kegiatan gerakan dan bacaan. waktu yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 2 X 40 menit atau 2 jam pelajaran.

Guru mengawali penyampaian materi pembelajaran ini dengan memberikan penjelasan terhadap apa yang harus dipraktekkan dan bagaimana cara mempraktekkan. Guru menjelaskan bahwa kegiatan praktek ini dilakukan oleh siswa dalam bentuk berkelompok atau berjamaah. Guru menjelaskan bahwa siswa akan dibagi dalam lima kelompok, kemudian secara bergiliran masing-masing kelompok akan mempraktekkan gerakan dan bacaan shalat. Selanjutnya diadakan komentar dan diskusi terhadap hasil yang ditampilkan oleh siswa pada kelompok yang mempraktekkan tersebut.

Berdasarkan hasil penjelasan guru tersebut, maka siswa dibagi dalam lima kelompok yang diberi nama dengan nama kelompok A, B, C, D dan E. Masing-masing siswa maju ke depan kelas dan berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan. Masing-masing kelompok terjadi perimbangan laki-laki dan perempuan.

Praktek shalat sebanyak dua rakaat dan dilakukan dengan cara berjamaah, salah seorang siswa yang laki-laki menjadi imam. Walaupun shalat dilakukan secara berjamaah, tapi siswa diminta untuk mengeraskan seluruh bacaan shalat. Adapun ayat yang dibaca setelah membaca surat al fatihan harus sama dalam satu kelompok, karena itu sebelum kelompok yang

akan tampil untuk mempraktekkan shalat, anggota kelompok sudah menyepakati ayat yang akan mereka baca pada saat mempraktekkan shalat, sedang bacaan lainnya dimungkinkan tidak terjadi perbedaan.

Guru menyuruh kelompok A untuk melaksanakan praktek shalat. Setelah selesai kelompok A mempraktekkan shalat, secara bergiliran anggota kelompok lainnya menyampaikan koreksi dan komentar terhadap kegiatan praktek yang dilakukan kelompok A. Terjadilah dialog dan diskusi serta adu argumentasi mana kala terjadi hal-hal yang berbeda pendapat, atau ada gerakan yang menurut satu kelompok benar dan menurut kelompok lain salah. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian untuk masing-masing kelompok sampai berakhir semua kelompok melakukan kegiatan praktek.

Dalam diskusi tidak jarang siswa mengemukakan pandangan yang berbeda dengan kelompok lain, misalnya pada saat satu kelompok ada salah seorang anggotanya yang melaksanakan shalat tidak jelas bacaan “ushalli”, padahal siswa tersebut membaca ushalla tapi tidak nampak terdengar. Cara yang demikian dikoreksi oleh kelompok lainnya bahwa dalam penyebutan ushalla harus keras. Sementara anggota kelompok yang lain mengatakan tidak harus didengar oleh yang lain, cukup yang membaca saja yang mendengar. Dalam persoalan-persoalan seperti ini gurulah yang memberikan penjelasan. Guru memberikan penjelasan bahwa dalam shalat diawali dengan niat. Letak niat di dalam hati, karena itu “ushalli” itu hanyalah semacam pengantar atau mengawali agar kita ingat bahwa kita harus berniat dalam melaksanakan shalat. Membaca “ushalli” bukan wajib kata gurunya, namun harus dibaca. Karena itu bisa dibaca lebih keras, bisa juga cukup didengar oleh yang membaca itu saja.

Dialog dan diskusi lainnya masih banyak terjadi. Apa yang diceritakan di atas hanyalah salah satu dari perbedaan pandangan dari siswa. Pada intinya, setelah dijelaskan oleh siswa atau guru semua siswa bisa memahami, walaupun mungkin terjadi pemahaman yang berbeda, tapi tetap dalam kerangka pemahaman yang memiliki dasar yang jelas. Para siswa diberikan kebebasan untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman masing-masing,

namun nampaknya para siswa toleran terhadap perbedaan-perbedaan kecil tersebut. Kebebasan yang diberikan guru dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Hal ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas bagi siswa, karena antara satu siswa dengan yang lainnya memiliki pengalaman yang berbeda.

Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, guru masih memberikan kesempatan kepada semua siswa, jika ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan oleh siswanya, namun nampaknya semua siswa sudah merasa cukup dengan diskusi dan penjelasan yang diberikan guru, di samping itu waktu dua jam pelajaran sudah hampir berakhir, sehingga guru segera menyimpulkan dan mengakhiri pembelajaran.

#### **D. Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya**

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh kedua madrasah tsanawiyah memberikan gambaran bahwa pada dasarnya kegiatan pembelajaran fikih materi shalat sudah memasukkan nilai-nilai demokrasi terutama pada aspek metode.

Berbagai indikator dari nilai demokrasi yang diterapkan dalam pembelajaran fikih di MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya dapat dilihat dari aktivitas pembelajarannya. Berbagai nilai yang termasuk indikator dari nilai demokrasi dapat dibuktikan dari kegiatan pembelajaran tersebut yaitu :

- a. **Kebebasan**, kegiatan pembelajaran fikih yang telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya kebebasan berpendapat yang diberikan oleh guru. Guru mata pelajaran fikih memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengemukakan pengetahuan, pandangan dan pengalaman masing-masing, tanpa adanya batasan. Kebebasan yang diberikan dalam suasana keterbukaan dengan tidak melihat salah atau benar yang dikemukakan oleh siswa, yang terpenting siswa dapat berpandangan dan melakukan aktivitas dalam kerangka pembelajaran secara bebas, termasuk juga diberikan kebebasan

untuk menanyakan yang belum mereka fahami. Hal ini terlihat baik pada saat pelajaran yang ingin mencapai tujuan kognitif atau psikomotorik.

Diantara kebebasan yang diberikan adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan pandangannya, kebebasan bertanya, kebebasan memberikan koreksi disertai dengan alasan dan dasar berfikir, kebebasan melakukan gerakan shalat yang menurut siswa yang melakukan benar. Kebebasan yang diberikan ini tentunya dalam kerangka pembelajaran dan dalam suasana yang tidak memberikan tekanan, sehingga siswa bisa berekspresi secara bebas, kemudian didiskusinya untuk mencari mana yang lebih benar dari semua yang mereka sampaikan atau mereka lakukan.

Kebebasan, persamaan dan musyawarah atau permusyawaratan adalah nilai pokok dari demokrasi, karena itu sangat penting memberikan kebebasan kepada anak untuk bermusyawarah. Menurut Syeikh Ali Abdurraziq yang dikutip oleh Abdurrahman Wahid bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syura.<sup>46</sup> Dengan demikian pemberian kebebasan yang diberikan oleh guru mata pelajaran fikih untuk bermusyawarah dan mengemukakan pendapat adalah satu bentuk penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran.

- b. **Kesetaraan, kesamaan hak dan kesempatan.** Semua siswa diperlakukan sama, bahkan antara guru dan siswa seolah tidak ada jarak. Guru bisa mengkritisi pandangan atau pendapat siswa, siswa juga bisa mengkritisi pendapat guru. Dengan demikian materi yang dipelajari bisa lebih terinci dan lebih jelas. Demikian juga pada saat pembagian kelompok diskusi dan kelompok praktek. Siswa tidak dibedakan dari kemampuan maupun jenis kelamin, semua dianggap sama dan memiliki hak yang sama. Pada saat diskusi dalam kelompok atau melaksanakan tugas kelompok, semua anggota kelompok mempunyai tugas masing-masing dan semua siswa berperan untuk menyelesaikan tugas dengan baik.
- c. **Keterbukaan.** Guru mata pelajaran fikih menanamkan nilai keterbukaan bagi siswanya. Terbuka untuk menerima masukan, koreksi dan pandangan yang

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Wahid, Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi, dalam M. Masykur Amin dan Moh Najib . . . .hal. 89.

berbeda. Diantara sikap keterbukaan yang ditanamkan oleh guru pada kegiatan pembelajaran fikih adalah tidak merasa paling benar dengan pendapatnya, tapi bersedia menerima kritik dan saran perbaikan. Nilai keterbukaan ini adalah salah satu dari nilai demokrasi . . . .

- d. **Kerjasama.** Dalam menyelesaikan tugas kelompok, para siswa melakukan kegiatan secara bersama, mereka secara bersama-sama menyelesaikan tugas, misalnya menyusun urutan tentang wajib shalat, syarat sah shalat, sunat shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat. Masing-masing kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan tugasnya. Kerjasama adalah salah satu dari nilai demokrasi. Aplikasi dari kerjasama diantaranya dengan bermusyawarah. Dengan bersama dan bekerjasama menetapkan sesuatu berarti sudah menerapkan nilai demokrasi.
- e. **Toleransi.** Dalam pembelajaran fikih tidak jarang ada pendapat yang berbeda disebabkan kebiasaan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga atau lingkungan tempat tinggalnya berbeda dalam melakukan tata cara ibadah. Kebanyakan perbedaan-perbedaan itu dalam masalah furuiyah atau hal-hal yang bukan prinsip. Para siswa ditanamkan untuk menghargai perbedaan itu dan tidak memaksakan kehendaknya selama ada dalil atau mujtahid yang membolehkannya. Misalnya dalam memahami tata cara berniat. Ada yang dimulai dari menyebut “ushalli ...” ada yang tidak. Jika mereka memiliki pandangan yang berbeda karena mengikuti satu mazhab tertentu, maka guru mengajarkan untuk toleran terhadap pandangan yang berbeda tersebut, karena keduanya memiliki landasan yang kuat. Toleran adalah satu nilai demokrasi. Hasan Asari dari UIN Syarif Hidayatullah dalam sebuah atikel yang berjudul Nilai-nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam Klasik, menyebutkan bahwa toleransi adalah sebagai nilai demokrasi yang penting dalam pendidikan Islam.
- f. **Kepercayaan dan persaingan.** Ternyata kepercayaan juga termasuk nilai demokrasi, karena kepercayaan terhadap kelompoknya pada saat mengerjakan tugas akan menjadi persaingan dengan kelompok lainnya, sehingga menimbulkan sikap bersaing, tapi tidak harus menetapkan diri

dalam kerangka harus menang. Kepercayaan terhadap pandangan, kepercayaan terhadap diri sendiri dan kepercayaan terhadap kelompok bukan berarti mengajarkan kepada siswa untuk sombong, tapi tetap dalam kerangka menghargai orang lain. Menurut Chamim dkk : kepercayaan dan persaingan adalah bagian dari nilai demokrasi<sup>47</sup>.

#### **E. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Fikih**

Mata pelajaran fikih di madrasah tsanawiyah berisi materi pelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Pada materi pelajaran tersebut sekalipun sudah ada petunjuk dan aturan yang jelas, namun ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perbedaan. Berbagai perbedaan tersebut seringkali membuat siswa bingung atau mungkin membuat pertanyaan yang tidak terselesaikan jika guru kurang bijak dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini tentunya dapat diselesaikan jika disikapi dengan cara menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran. Nilai demokrasi bisa digunakan dalam pembelajaran fikih di madrasah tsanawiyah dapat dilakukan dengan baik manakala didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran adalah :

- a. Kesiapan siswa. Kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi dari pelajaran sebelumnya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerapan nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran fikih. Materi yang diberikan di kelas VII MTs ini adalah materi pelajaran yang sudah banyak diketahui dan dipraktikkan oleh siswa, namun materi pelajaran ini perlu untuk diadakan pendalaman, karena pelajaran yang diberikan pada jenjang sebelumnya di Taman Kanak-kanak atau di SD/MI hanya dalam bentuk hafalan. Dengan kata lain, siswa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dasar. Dengan pengetahuan dasar tersebut maka memungkinkan

---

<sup>47</sup> Chamim, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 35)

siswa untuk menemukan konsep dengan menganalisis penjelasan guru sesuai dengan yang difikirkan dan dialaminya.

Untuk memahami pelajaran yang lebih tinggi diperlukan kesiapan. Bruner berpendapat bahwa kesiapan (*readiness*) adalah salah satu dari empat tema pendidikan, yaitu : struktur pengetahuan, kesiapan, menekankan nilai intuisi dan motivasi atau keinginan untuk belajar. Keempat tema tersebut nampaknya sudah ada pada siswa MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya, sehingga menjadi faktor yang dapat mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fikih.

- b. Kemampuan guru memahami perkembangan kognitif siswa. Menurut Piaget perkembangan kognitif siswa MTs berada pada tahap operasionalformal, karena dilihat dari sudut usia sudah berada usia 11 atau 12 tahun lebih. Ciri pokok perkembangan kognitif pada tahap operasional formal adalah anak sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola fikir “kemungkinan”. Model berfikir ilmiah sudah mulai dimiliki siswa, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis. Guru mata pelajaran fikih di kedua MTs ini nampaknya memahami dengan kondisi siswa. Faktor ini tentunya tidak terlepas dari pengalaman guru yang sudah cukup lama mengajar di MTs, sehingga dapat memahami perkembangan kognitif siswa, walaupun secara teoritik mereka belum banyak menguasai, namun pada prakteknya sudah dapat melakukan.
- c. Penciptaan suasana yang menyenangkan. Suasana pembelajaran akan mempengaruhi dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang demokratis. Suasana yang diciptakan oleh guru adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga para siswa tidak merasa tertekan dalam belajar. Siswa diberi kebebasan untuk berekspresi selama dalam kerangka pendalaman materi pelajaran. Nilai demokrasi bisa berkembang dengan suasana belajar yang menyenangkan atau yang sering disebut dengan *Joyfull Learning*. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti tidak bermakna, tapi semua yang dilakukan harus memiliki makna, misalnya berdebat atau eradu argumentasi harus terarah sehingga semua kegiatan

dalam pembelajaran penuh dengan makna atau menurut istilah Ausubel disebut “*meaningfull learning*”.

- d. Kebebasan berinteraksi. Siswa tidak hanya belajar secara individual, tapi siswa juga belajar bersama. Hal ini sesuai dengan teori belajar *sosiogenesis* dari Vygotsky yang mengatakan bahwa dimensi kesadaran sosial berifat primer, sedangkan dimensi individual bersifat skunder, artinya pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial yang berada di luar dirinya. Dalam pembelajaran fikih di kedua MTs tersebut para siswa mengkaitkan materi yang sedang dipelajari dengan yang terjadi di masyarakat. Siswa diberikan kebebasan berinteraksi antar siswa juga dengan guru, sehingga siswa dapat mengonstruksi nilai-nilai baru dalam pembelajaran dengan mengolah pengetahuan individunya dengan yang dia peroleh di masyarakat.
- e. Model pembelajaran yang digunakan. Pemilihan model pembelajaran sangat mempengaruhi dalam penembangan nilai demokrasi dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih harus memungkinkan untuk memberikan suasana yang demokratis dengan memberikan suasana kebebasan, kebersamaan, toleransi, kesetaraan, kepercayaan dan persaingan yang sehat. Model pembelajaran yang dipilih guru mata pelajaran fikih di kedua MTs tersebut adalah *direct learning* dan *cooperative learning*. *Direct learning* dikembangkan dengan bervariasi dan dilakukan dengan sikap yang santun sehingga memungkinkan berkembangnya nilai demokrasi. Terlebih lagi dengan *cooperative learning* tentu dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih demokratis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembelajaran fikih di kelas VII MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya dilakukan dengan menggunakan model direct learning dan cooperative learning. Pada direct learning digunakan ceramah bervariasi sehingga memungkinkan interaksi yang lebih terbuka dengan guru maupun antar sesama siswa. Nilai demokrasi yang dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran tersebut adalah keebasan, kesetaraan, toleransi, keterbukaan, kepercayaan dan persaingan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai demokrasi adalah kesiapan siswa, kemampuan guru memahami perkembangan kognitif siswa, penciptaan suasana yang menyenangkan, kebebasan berinteraksi dan model pembelajaran yang digunakan.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya para lebih banyak lagi dalam menguasai model-model pembelajaran sehingga pembelajaran lebih variatif dan dapat menerapkan nilai demokrasi pada setiap materi.
2. Kementerian agama dan atau Kepala Madrasah perlu membuat program pelatihan atau pembimbingan dalam memahami dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai demokrasi.
3. Nilai demokrasi tidak hanya diterapkan pada materi pelajaran tentang demokrasi, tapi hendaknya para guru menanamkan nilai demokrasi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan pendidikan di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah menciptakan manusia yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M Syaefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Evalusi Fikih*, terj. Ginus Partadiredja Bandung: Anjana Pustaka, 2007.
- Abu Bakar Ibn al - Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I, Dar – al - Ihya'al - Kutub al - Arabiyah, 1957 M.
- Abdurahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Masyhur Amin & Mohammad Najib (ed.) : *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, LKPSM NU-DIY, 1993.
- Abu Tsana' al-Alausy, *Ruh al-Ma'ani di tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Ma'ani*, al-Minbariyah, Mesir 1345 H, juz XXV.
- Ainun Naqim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multi Kultural : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008.
- Al-'Amid Sulaiman Muhammad al-Thamawy, *al-Demokrathiyah wa al-Dustur al-Jadid, Hai'ah al-Isti'lamat al-Mishriyah*, Mesir 1971 M.
- Anwar Hariyono, *Lawan Pendapat adalah Kawan Berpikir*, Majalah Bulanan Media Dakwah, No 197, Rabi'ul Akhir 1411 H/November 1990 M.
- Ausubel,D.P.,*The Psychology of Meaningful Verbal Learning*, New York: Grune and Straton, 1968.
- B, Russel., *Pendidikan dan Tatanan Sosial*, terj. Abadi, A.S., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Chamim, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Danim, Sudarman., *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Depdiknas, UU RI No 20 Tahun 2003

- Diding Nurdin, "Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani", *Harian Pikiran Rakyat*, 23 Nopember 2008.
- Fiere, P. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003.
- Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Jean Piaget, *The Child's Conception of the World*, Savage, Maryland: Littlefield Publishers, 1951.
- Lev Semyonovich Vygotsky, L.S. *Mind in Society*, Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- Mastuhu, "Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi panel senat mahasiswa *Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel*, Malang, 26 Oktober 1996.
- Mazrur, Model Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangka Raya, *Penelitian* (tidak dipublikasikan), Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2012.
- Melvin L. Silberman, *Active Learning, 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, Terj. Sarduli dkk Yogyakarta : Yappendis, 2001.
- Moh. Shofan, ed. *Realistik Education ; Menuju Masyarakat Utama*, Yogyakarta: Ircisod, 2007.
- Muhammad Dimiyati, "Difusi Unsur Kebudayaan dan Problematika Pembelajaran Agama di Indonesia dalam Era Teknologi Informasi, *Makalah*, dipresentasikan pada Seminar HAB Depag RI ke 50 di Surabaya tanggal 30 Desember 1993 hal. 3
- Mu'jam al-fadh al-Qur'an al-Karim, juz II, I'dad Majma' al-Lughah al-Arabiyah*, Kairo-Mesir 1970 M.
- M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia, dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
- Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan*, Bandung : Mizan. 1993.

- Sardiman, A.S., Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Aspek Kebijakan, Makalah disajikan dalam *Seminar dan Diskusi Panel Nasional Teknologi Pembelajaran V Kerjasama UM dan IPTPI Cabang Malang di Malang*, 20 Nopember 2000.
- Syamsul Arifin dan Ahmad barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf Dalam Islam*, Malang : UMM Press, 2001.
- Syarifuddin, A. *Interilasi Fikih dengan Ilmu lain dalam Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986
- Ratna Willis Dahar,. *Teori-teori Belajar*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Tant Mujiyanto, *Demokrasi Pendidikan*, Majalah Suara Muhammadiyah No. 22 Th. Ke-78, 16-30 November 1993.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Wierdan, HM. *Sebab-sebab Konflik : sebuah tinjauan manajerial*, Majalah Suara Muhammadiyah No. 16, Th. Ke-77, 16-31 Agustus 1992.
- Zakaria Abdul Mun'im Ibrahim al-Khatib, *Nidham al-Syura fi al-Islam wa Nadham al-Demoqrathiyah al-Mu'ashirah*, 1405 H/1985 M.



## **BIODATA PENELITI**

NAMA : DR. MAZRUR, M. Pd

NIP : 19620608 198903 1 003

NIDN : 20

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA TKI/ IVa

JABATAN : LEKTOR KEPALA

TEMPAT TANGGALLAHIR : RANTAU KEMINTING, 8 JUNI 1962

ALAMAT RUMAH : JL.KECUBUNG I NO. 08 KOMP. PALANGKA  
PERMAI PALANGKA RAYA

NO HANDPHON : 08125094205

INSTANSI : IAIN PALANGKA RAYA

FAKULTAS/PRODI : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI

PENGALAMAN PENELITIAN 3 TAHUN TERAKHIR :

1. PENGARUH CTL DAN GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN FIKIH DI MTsN PALANGKA RAYA
2. PEMETAAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PAI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALANGKA RAYA

PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 3 TAHUN TERAKHIR :

DESKRIPSI PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN FIQH  
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PALANGKA RAYA (artikel)

PALANGKA RAYA, NOPEMBER 2017

DR. MAZRUR, M. Pd